

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**PERANAN MILITER DALAM POLITIK INDONESIA
(1945-1959)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Sejarah



Disusun Oleh:

ERNA SUGIARTI

051314018

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH

JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2010

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**PERANAN MILITER DALAM POLITIK INDONESIA
(1945-1959)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Sejarah



Disusun Oleh:

ERNA SUGIARTI

051314018

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH

JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2010

SKRIPSI
PERANAN MILITER DALAM POLITIK INDONESIA
(1945-1959)

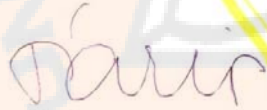
OLEH,

ERNA SUGIARTI

NIM: 051314018

Jelah disetujui oleh:

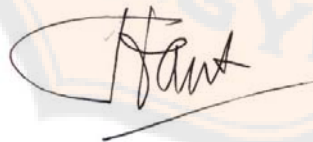
Pembimbing I



Dr. Anton Haryono. M. Hum

Tanggal, 18 November 2009

Pembimbing II



Drs. A.K. Wiharyanto, M. M.

Tanggal, 2 Desember 2009

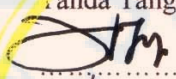
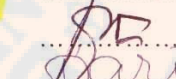

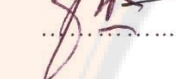
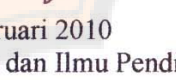
SKRIPSI
PERANAN MILITER DALAM POLITIK INDONESIA
(1945-1959)

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

ERNA SUGIARTI
NIM: 051314018

Telah dipertahankan di depan panitia pengujian
pada tanggal 2 Februari 2010
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Panitia Pengujian

	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	Yohanes Harsoyo, S.Pd., M.Si.	
Sekretaris	Drs. B. Musidi. M. Pd.	
Anggota	Dr. Anton Haryono. M. Hum.	
Anggota	Drs. A. K. Wiharyanto. M. M.	
Anggota	Drs. B. Musidi. M. Pd.	

Yogyakarta, 2 Februari 2010
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sanata Dharma

Dekan



Drs. Farsisius Sarkim, M.Ed. Ph.D

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

MOTTO

Hanya orang takut yang bisa berani, karena keberanian adalah melakukan sesuatu yang ditakutinya. Maka, bila merasa takut, anda akan punya kesempatan untuk bersikap berani.

(Mario Teguh)

Bermimpi adalah langkah pertama, kerja keras dan ketekunan adalah langkah-langkah selanjutnya, cinta dan berkat Tuhan adalah sumber keberuntungan yang membuat mimpi menjadi kenyataan.

“Hidup adalah perjuangan yang harus dijalani dan dimenangkan”

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PERSEMBAHAN

Karya kecil ini ku persembahkan untuk:

- Allah SAW yang telah memberikan rahmat, hidayat, petunjuk dan segala kemudahan yang telah diberikan.
- Kedua orang tuaku Bapak Adi Suwitmo dan Ibu Soyinah yang telah membesarkan dan mendidik ku penuh kasih sayang.
- Kakakku Suparno dan Yuli Triani serta kedua adikku Sudrajat Puji Priyanto dan Fendi Prasetyo Budi Pamungkas yang telah memberikan doa dan dukungannya.
- Hermawan. C. B yang selalu ada dalam susah dan senangku.
- Para pendidk dan sahabat-sahabat ku di Pendidkan Sejarah.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 2 Februari 2010

Penulis,


(Erna Sugiarti)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN

PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Erna Sugiarti

Nomor Mahasiswa : 051314018

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul:

PERANAN MILITER DALAM POLITIK INDONESIA (1945-1959)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelola dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta,

Pada tanggal: 2 Februari 2010

Yang menyatakan,



(Erna Sugiarti)

ABSTRAK

**PERANAN MILITER DALAM POLITIK INDONESIA
(1945-1959)**

**Oleh : Erna Sugiarti
NIM : 051314018**

Skripsi ini disusun untuk mendeskripsikan dan menganalisis: latar belakang peranan militer dalam politik Indonesia, peranan militer dalam politik Indonesia tahun 1945-1959, dampak peranan militer bagi pemerintahan Indonesia.

Skripsi ini disusun berdasarkan metode penelitian sejarah yang mencakup empat tahapan yaitu: heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan historis, politik, psikologis dan ekonomi. Sedangkan model penulisannya bersifat deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedatangan Belanda kembali ke Indonesia masih memperlihatkan lemahnya pemerintahan sipil. Sipil dan militer belum menunjukkan adanya kerjasama untuk menyelesaikan konflik dengan Belanda. Peranannya dalam politik sebagai kekuatan pertahanan juga keamanan, militer sebagai pertahanan menjaga serangan dari luar, sedang kemanan militer menegakkan supermasi sipil. Dampak peranan militer bagi pemerintahan Indonesia, adanya dwifungsi ABRI dominasi partai politik berkurang dalam parlemen, disisi lain militer semakin berkembang, baik dipertahanan, politik dan ekonomi.

ABSTRACT

**THE ROLE OF MILITARY IN THE INDONESIAN POLITICS
IN 1945-1959**

By : Erna Sugiarti
NIM : 051314018

This research was to describe and analyze the background of the military's role in Indonesian politics, the role of military in the Indonesian politics in 1945-1959, the effect of the role of the military for the Indonesia government.

This research was arranged based on the method of history research which included four stages, they are: heuristic, verification, interpretation, and historiography. This research used historical, political, psychological, and economical model approaches. While the type of the process of writing was analytical descriptive.

The research showed that the coming back of the Dutch to Indonesia still showed the weakness of the civil administration. The civil society and the military didn't show that they worked together to solve the conflict with Dutch. Its obvious role in politics as the power of defence and the security, was still weak as well as its role was to defence the threat from outside and to keep the civil supremacy. The impact of military role in Indonesian government, as manifested on the dual function of ABRI, the domination of political parties in the parliament was decreased. On the other hand, the military force was developed either in the defence, politics and economy.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya sehingga skripsi yang berjudul “Peranan Militer dalam Politik Indonesia (1945-1959)” dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Sanata Dharma.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma.
2. Ketua Program Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. P.J Suwarno, S.H, selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan perhatian membimbing serta memberi banyak saran, masukan dan pemikiran.
4. Bapak Drs. A. K. Wiharyanto, M. M. selaku pembimbing yang dengan sabar telah memberikan masukan dan saran.
5. Bapak Dr. Anton Haryono. M. Hum, selaku pembimbing pengganti dan penguji yang telah memberikan saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Program Pendidikan Sejarah dan pihak sekretariat Pendidikan Sejarah yang telah memberikan dukungan dalam penulisan ini khususnya, dan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dukungan serta bimbingan dan bantuan selama penulis menyelesaikan studi di Universitas Sanata Dharma.

7. Staf UPT Perpustakaan Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan pelayanan kepada penulis dalam mendapatkan sumber sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Adi Suwitmo dan Ibu Soyinah yang telah memberikan kasih sayang, doa dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Sanata Dharma. Serta Mbah Kusnada, Mbah Sudini, Mbah Sungkowo, Kakak ku Mas Parno, Mba Yuli, Mas Kis, Mba Lastri, Adek ku Drajat dan Fendi. Terimakasih atas doa dan dukungannya selama ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa segala sesuatu tiada yang sempurna. Demikian juga skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu segala kritik dan saran yang membangun penulis terima dengan terbuka. Penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi para pembaca pada umumnya dan bagi penyusun.

Yogyakarta, 2 Februari 2010

Penulis,

Erna Sugiarti.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya sehingga skripsi yang berjudul “Peranan Militer dalam Politik Indonesia (1945-1959)” dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Sanata Dharma.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma.
2. Ketua Program Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. P.J Suwarno, S.H, selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan perhatian membimbing serta memberi banyak saran, masukan dan pemikiran.
4. Bapak Drs. A. K. Wiharyanto, M. M. selaku pembimbing yang dengan sabar telah memberikan masukan dan saran.
5. Bapak Dr. Anton Haryono. M. Hum, selaku pembimbing pengganti dan penguji yang telah memberikan saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Program Pendidikan Sejarah dan pihak sekretariat Pendidikan Sejarah yang telah memberikan dukungan dalam penulisan ini khususnya, dan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dukungan serta bimbingan dan bantuan selama penulis menyelesaikan studi di Universitas Sanata Dharma.

7. Staf UPT Perpustakaan Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan pelayanan kepada penulis dalam mendapatkan sumber sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Adi Suwitmo dan Ibu Soyinah yang telah memberikan kasih sayang, doa dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Sanata Dharma. Serta Mbah Kusnada, Mbah Sudini, Mbah Sungkowo, Kakak ku Mas Parno, Mba Yuli, Mas Kis, Mba Lastri, Adek ku Drajat dan Fendi. Terimakasih atas doa dan dukungannya selama ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa segala sesuatu tiada yang sempurna. Demikian juga skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu segala kritik dan saran yang membangun penulis terima dengan terbuka. Penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi para pembaca pada umumnya dan bagi penyusun.

Yogyakarta, 2 Februari 2010

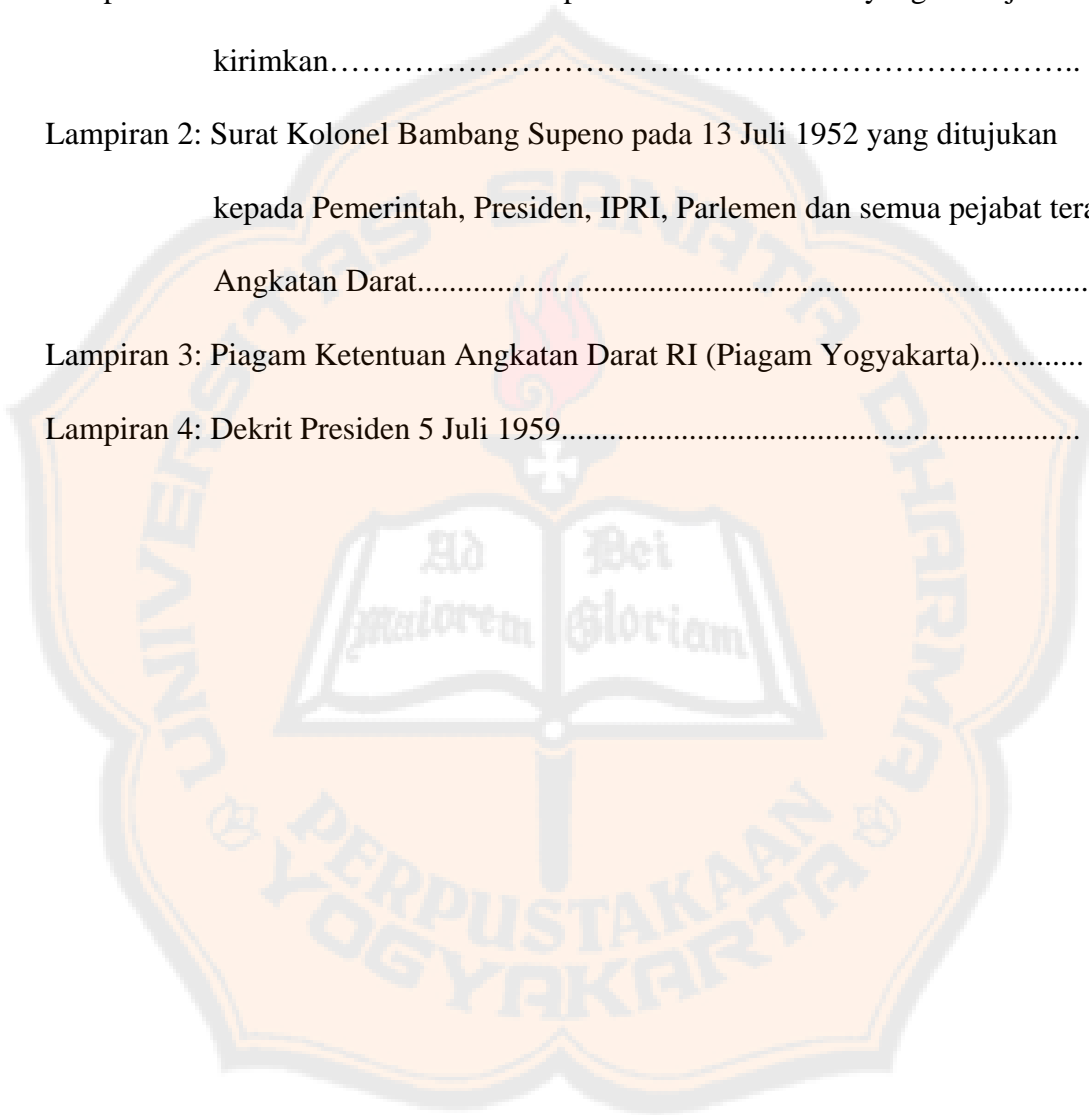
Penulis,

Erna Sugiarti.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Jenderal Sudirman kepada Presiden Sukarno yang tidak jadi di kiriman.....	85
Lampiran 2: Surat Kolonel Bambang Supeno pada 13 Juli 1952 yang ditujukan kepada Pemerintah, Presiden, IPRI, Parlemen dan semua pejabat teras Angkatan Darat.....	87
Lampiran 3: Piagam Ketentuan Angkatan Darat RI (Piagam Yogyakarta).....	90
Lampiran 4: Dekrit Presiden 5 Juli 1959.....	91



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu organ yang perlu dimiliki oleh pemerintah suatu negara adalah militer, yang merupakan suatu kelompok orang-orang yang diorganisasi dengan disiplin untuk melakukan pertempuran yang diperbedakan dari orang-orang sipil.¹ Lahirnya militer ini tidak bisa lepas dari masa pemerintahan Jepang di Indonesia. Jauh sebelum militer terbentuk, Jepang pada saat memerintah Indonesia telah membentuk tentara untuk menunjang kepentingannya, seperti Haiho dan Peta. Setelah Jepang kalah oleh Sekutu Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Tentara pada masa Jepang seperti Peta ini dibubarkan dan dilucuti senjatanya, sehingga Indonesia tidak mempunyai tentara yang dapat melindungi negara dari serangan baik dari dalam maupun luar.

Pada masa kekosongan kekuasaan tersebut banyak muncul organisasi-organisasi pemuda yang dikenal dengan laskar. Kelompok ini merupakan kelompok yang tidak mempunyai senjata, tidak terlatih, tidak berdisiplin dan tidak mempunyai pemimpin yang berpengalaman, selain itu mereka mempunyai ideologi sendiri dan sering berselisih paham dengan pemerintahan Sukarno.²

Untuk mengatasi sikap laskar yang sewenang-wenang, pemerintah mengadakan sidang PPKI pada 22 Agustus 1945, Sukarno membentuk sebuah Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP) yang terorganisasi dalam Badan Keamanan

¹ Yahya A. Muhaimin, *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1982, hal. 1.

² Sundhaussen, *Politik Militer Indonesia 1945-1967*, Jakarta: LP3ES, 1986, hal. 10.

Rakyat (BKR). BKR sendiri baru dibentuk pada 22 Agustus 1945, BKR bukanlah sebuah organisasi ketentaraan yang resmi melainkan bersifat kerakyatan yang anggotanya didasarkan atas kesadaran individual. BKR selain terdapat di pusat juga terdapat di daerah. Baik di pusat maupun di daerah-daerah BKR berada di bawah KNIP dan KNI- Daerah, tidak di bawah presiden sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang.

Menyadari pentingnya Angkatan Perang dalam mempertahankan kemerdekaan, pada 5 Oktober 1945 pemerintah mendirikan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dengan Urip Sumohardjo sebagai kepala stafnya dan Kolonel Sudirman sebagai panglima besar TKR. Setelah lahirnya TKR, maka BKR, Peta, KNIL, Haiho dan laskar-laskar lainnya oleh KNIP lembaga-lembaga tersebut disatukan di bawah TKR³. Dikarenakan pembentukan TKR belum memuaskan seluruh anggotanya pada 26 Januari 1946 TKR diubah kembali namanya menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). TRI ini sifatnya nasional dan sekaligus merupakan satu-satunya organisasi militer di Indonesia. Tidak sejalannya pemikiran antara pihak militer, pemerintah, dan laskar-laskar rakyat dalam menghadapi Belanda diputuskan mulai 3 Juni 1947 berdiri Tentara Nasional Indonesia (TNI).⁴

Idealnya fungsi militer di dalam negara adalah melakukan tugas dibidang pertahanan. Sedangkan tugas dibidang keamanan negara menjadi tugas golongan sipil. Namun di Indonesia, negara yang baru merdeka dan belum memiliki sistem politik yang stabil, serta pencapaian kemerdekaan kebanyakan dilakukan dengan

³ Muhammad Rusli Karim, *Peran ABRI dalam Politik*, Jakarta: Haji Masabung, 1989, hal. 23.

⁴ *Ibid.*, hal. 25.

jalan kekerasan senjata, menjadikan golongan militer memegang peranan dibidang pertahanan dan keamanan.

Kebanyakan tentara yang berjuang dalam perang kemerdekaan, menganggap perjuangan mereka selain bersifat militer juga bersifat politik, karena perbedaan antara golongan militer dan sipil tidak jelas. Ketidakjelasan ini disebabkan militer yang terbentuk saat itu bukan dari pendidikan militer profesional, melainkan kesadaran rakyat untuk ikut berjuang dalam merebut kemerdekaan.

Adanya kemajemukan dan perbedaan latar belakang pendidikan serta perbedaan budaya diantara tentara yang memperoleh pendidikan secara profesional, bekas tentara pada masa penjajahan Jepang dan laskar-laskar rakyat, menjadikan anggota tentara yang berasal dari masa Jepang dan laskar-laskar rakyat terjun dalam dunia politik dan menjadi salah satu anggota organisasi politik. Tentara yang dilatih Jepang menganggap tidak perlu enggan untuk terlibat dalam dunia politik, berbeda dengan tentara yang memperoleh pendidikan secara profesional harus bersikap netral dalam politik.⁵

Kecenderungan militer masuk dunia politik semakin kuat setelah tahun –tahun berikutnya mereka harus mengatasi bukan hanya pemberontakan dari dalam tetapi juga dari Belanda yang kembali lagi ke Indonesia. Keterlibatan militer pada masa awal kemerdekaan terlihat pada saat awal terbentuknya Kabinet Syahrir. Persatuan Perjuangan yang dipimpin Tan Malaka melakukan oposisi terhadap Kabinet Syahrir dan melakukan penculikan terhadap Syahrir. Panglima Sudirman yang semula

⁵ Harold, Crouch, *Militer dan politik di Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, 1986, hal. 23.

mendukung Persatuan Perjuangan akhirnya atas desakan Presiden Sukarno menyatakan sikapnya mendukung pemerintah serta menindak Persatuan Perjuangan.

Selesai masalah dengan Persatuan Perjuangan, militer kembali terlihat dalam politik saat pemberontakan PKI di Madiun pada 19 September 1948. Militer bertindak selain melakukan pertahanan juga melakukan tugas sosial politik. Baru selesai penumpasan FDR/ PKI, Belanda melancarkan agresi militernya yang kedua dengan menyerang dan menduduki ibu kota Yogyakarta pada 19 Desember 1948. Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta beserta beberapa menteri ditahan Belanda. Militer di bawah Nasution membentuk pemerintahan militer pada 22 Desember 1948 dengan pertimbangan bahwa harus ditunjukkan pada dunia Internasional, khususnya Belanda bahwa pemerintahan Republik Indonesia, terutama di Jawa masih eksis dan TNI sebagai tulang punggung perjuangan masih memiliki kekuatan yang cukup.⁶

Setelah Indonesia kembali menjadi NKRI militer dalam politik di Indonesia keterlibatannya terlihat kembali saat peristiwa 17 Oktober 1952, militer melakukan demonstrasi di depan istana presiden menuntut dibubarkannya parlemen, disebabkan parlemen terlalu mencampuri urusan intern militer. Berawal dari surat Kolonel Bambang Supeno kepada presiden dan parlemen yang isinya sudah tidak percaya lagi dengan kepemimpinan KSAD Nasution dan menuntut Nasution diberhentikan. Bagi militer tindakan Kolonel Bambang Supeno sudah melakukan tindakan indiscipliner, tetapi masalah surat Kolonel Bambang Supeno di parlemen dibahas terus menerus

⁶ Hendri Supriyatmo, *Nasution, Dwifungsi ABRI dan Kontribusi kearah Reformasi Politik*, Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1994, hal. 24.

dan memojokkan militer. Akibat peristiwa ini Nasution dinonaktifkan dari militer sampai tahun 1955.

Sekembalinya Nasution sebagai KSAD peranan militer dalam politik Indonesia semakin terlihat saat melakukan pidatonya dalam Dies Natalis Akademi Militer Nasional pada 12 November 1958 di Magelang yang dikenal sebagai *The Army's Middle Way* (Jalan Tengah TNI)⁷. Faktor yang memudahkan berkembangnya konsep ini adalah pecahnya pemberontakan PRRI/Permesta, sehingga timbul krisis politik dan keamanan yang menyebabkan dimaklukkannya *Staat van Oorlog en van Beleg* (SOB: negara dalam keadaan perang dan bahaya).⁸ SOB telah memberikan wewenang kekuasaan kepada TNI dari pusat sampai ke daerah-daerah yang mencakup berbagai bidang termasuk di bidang politik.

Konsepsi “Jalan Tengah” itu telah pula digunakan untuk menembus jalan buntu politik yang disebabkan oleh gagalnya konstituante hasil pemilihan umum pertama 1955 dalam menyusun konstituante baru. Untuk mencegah berlarut-larutnya keadaan, tahun 1958 KSAD Letnan Jenderal A.H. Nasution selaku anggota Dewan Nasional mengajukan usul supaya UUD 1945 diberlakukan kembali yang kemudian dilaksanakan melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

⁷ *Ibid.*, hal. 110.

⁸ Keadaan Darurat Perang adalah didasarkan pada statute Hindia Belanda dahulu, yaitu *Regeling op den Staat van Oorlog en van Beleg* atau berarti “Peraturan Negara dalam Bahaya dan Perang” yang lazimnya disingkat SOB. Pasal 37 dari SOB itu antara lain memberi kekuasaan kepada militer untuk menyimpang dari perundang-undangan yang ada guna mengambil sesuatu tindakan dalam suatu keadaan darurat yang memaksa, apapun dan bagaimanapun macamnya, *Idem.*, hal. 110.

B. Rumusan masalah

1. Apa latar belakang peranan militer dalam politik Indonesia?
2. Bagaimana peranan militer dalam politik Indonesia (1945-1959)?
3. Bagaimana dampak peranan militer bagi pemerintahan Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peranan militer dalam politik Indonesia (1945-1959).

2. Tujuan Khusus

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis latar belakang peranan militer dalam politik Indonesia.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis peranan militer dalam politik Indonesia (1945-1959).
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis dampak peranan militer bagi pemerintahan Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan.

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai peranan militer dalam politik Indonesia (1945-1959).

2. Bagi Universitas Sanata Dharma.

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi Universitas Sanata Dharma dalam hal ini FKIP, khususnya bagi perkembangan ilmu sejarah mengenai peranan militer dalam politik Indonesia (1945-1959).

3. Bagi Penulis

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan pengetahuan dan memberikan pengalaman bagi penulis dalam penulisan karya ilmiah.

E. Tinjauan Pustaka

Sumber merupakan unsur pokok dalam penulisan sejarah. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa sumber yang digunakan untuk menjawab masalah-masalah tersebut. Sumber-sumber yang digunakan dapat dibagi dalam sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah kesaksian dari seorang saksi dengan mata kepala sendiri atau saksi dengan pancaindera yang lain atau dengan alat mekanik seperti diktafon dan lain-lain untuk mengetahui suatu peristiwa.⁹ Louis Gattschalk juga menekankan bahwa sumber primer tidak perlu “Asli” (asli yang dimaksudkan di sini adalah bahwa dari sumber yang ada dalam peristiwa tersebut) tetapi sumber primer itu hanya harus “Asli” dalam artian kesaksiannya tidak berasal dari sumber lain melainkan berasal dari tangan pertama.¹⁰ Dengan demikian sumber primer harus dihasilkan oleh seseorang yang sejaman dengan peristiwa yang dikisahkan.¹¹

⁹ Louis, Gattschalk, *Mengerti Sejarah*, Jakarta: UI Press, 1969, hal. 35.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 36.

¹¹ *Ibid.*, hal. 35.

Adapun dalam penulisan ini sumber primer yang digunakan adalah berupa sumber tertulis yang diperoleh melalui buku-buku yang ditulis langsung oleh orang yang mengalami peristiwa tersebut. Buku-buku yang dimaksudkan penulis adalah sebagai berikut:

Kekerjaan ABRI, buku ini ditulis oleh Djenderal TNI A. H. Nasution, diterbitkan oleh penerbit Seruling Masa, Djakarta, 1971. Buku ini berisi tentang riwayat hidup Djenderal A. H. Nasution, lahir dan perkembangan kekarjaan ABRI yang terjadi saat Djenderal A.H. Nasution memegang pimpinan tentara. Selain itu terdapat juga sejarah pertumbuhan ABRI baik dari segi sosial, politik dan struktural, pemikiran mengenai misi-misi ABRI dan perjuangan Orde Baru. Penulis mengambil buku ini sebagai acuan menulis karena di dalam buku ini terdapat keterlibatan ABRI dalam politik di Indonesia yang ditulis langsung oleh pelaku sejarahnya.

Tentara Nasional Indonesia I, buku ini ditulis oleh Djenderal TNI A. H. Nasution, penerbit Ganaco N. V. Bandung, 1963. Buku ini berisi tentang masalah politik militer yang terjadi setelah kemerdekaan dan sejarah bagaimana tentara dilahirkan setelah mengalami beberapa kali pergantian nama. Isi buku ini dijadikan penulis sebagai sumber primer karena di dalamnya ditulis langsung oleh pelaku sejarah dalam peristiwa yang terjadi pada saat itu.

Soal – soal Politik Militer di Indonesia, buku ini ditulis oleh Major Djenderal T.B. Simatupang, penerbit Gaya Raya Limited, Djakarta, 1956. Buku ini berisi tentang bagaimana perjuangan Angkatan Perang pada masa sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan, serta berbagai persoalan politik militer yang terjadi di

Indonesia. Buku ini ditulis langsung oleh pelaku yang mengalami peristiwa pada saat itu, maka penulis menjadikan buku ini sebagai sumber primer.

Selain sumber primer di atas, penulis menggunakan sumber sekunder yang mendukung bagi penulisan skripsi ini. Sumber sekunder adalah kesaksian dari siapa pun yang bukan merupakan saksi pandangan mata, yakni dari seseorang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahnya.¹² Dengan kata lain sumber sekunder merupakan sumber yang telah ditulis ulang, penulis yang bersangkutan tidak hidup sejaman dengan peristiwa atau sumber yang diperolehnya. Adapun buku yang digunakan penulis antara lain sebagai berikut:

Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966, buku ini ditulis oleh Yahya A. Muhaimin, penerbit Gajah Mada University Press, 1982. Buku ini membahas tentang kelahiran militer yang memberikan *psichology impact* kepada para perwira militer dan itu sangat menentukan perkembangan militer dikemudian hari. Sebenarnya organisasi ketentaraan Indonesia benar-benar bersifat militer yaitu pada 3 Juni 1947 sebagai hari lahirnya Tentara Nasional Indonesia, namun hal ini menjadi tidak berarti karena tunasnya sudah berdiri sejak 1945, yaitu pada saat dibentuk TKR pada 5 Oktober 1945 yang sampai sekarang dijadikan hari ulang tahun kelahiran Angkatan Perang atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Penulis menggunakan buku ini karena di dalamnya memuat peranan militer dalam politik, diantaranya terlihat pada peristiwa 17 Oktober 1952, militer menuntut pembubaran parlemen. Adanya SOB yang membuat militer bebas mengambil kebijakannya

¹² *Idem.*, hal. 35.

sendiri dan konsep jalan tengah yang dikeluarkan oleh Nasution menjadikan militer semakin terlibat di dalam politik.

Militer dan Politik di Indonesia, buku ini ditulis oleh Harold Crouch, penerbit Sinar Harapan, Jakarta, 1986. Buku ini membahas tentang peranan tentara dalam politik dan demokrasi terpimpin yang di dalamnya terdapat adanya percobaan kudeta dan surat perintah 11 Maret sampai akhirnya keruntuhan Sukarno. Buku ini digunakan penulis karena memuat tentang asal mula peranan tentara dalam politik sampai tentara memasuki bidang-bidang yang dipegang oleh sipil seperti di parlemen, kabinet dan administrasi.

Politik Militer Indonesia 1945-1967 menuju Dwifungsi ABRI, buku ini ditulis oleh Ulf Sundhaussen, penerbit LP3ES, Jakarta, 1986. Buku ini membahas tentang hubungan sipil dengan militer (Angkatan Darat) yang semakin memburuk, ketika terjadi perselisihan antara militer dengan sipil untuk yang pertama kali. Pemimpin sipil setidaknya bertanggung jawab atas tindakan Angkatan Darat dalam memperluas peran politiknya. Peran Angkatan Darat di sini ingin mempertahankan kepentingan-kepentingan golongan militer dalam arti yang lebih luas terhadap campur tangan para pemimpin sipil.

Nasution, Dwifungsi ABRI dan Kontribusi kearah Reformasi Politik, buku ini ditulis oleh Hendri Supriyatmo, penerbit Sebelas Maret University Press, Surakarta, 1994. Buku ini membahas tentang perubahan –perubahan politik tahun 1950-an. Terjadi transformasi politik dari sistem parlementer ke sistem demokrasi terpimpin. Di dalamnya juga lebih menyoroti bagaimana peran Nasution dalam politik militer yang terjadi di Indonesia.

Dwifungsi ABRI Perkembangan dan Peranannya dalam Kehidupan Politik di Indonesia, buku ini ditulis oleh Soebijono, S.H, dkk, penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1992. Buku ini berisi tentang perkembangan fungsi ABRI sebagai kekuatan sosial politik pada masa Perang Kemerdekaan (1945-1949), masa Demokrasi Liberal (1949-1959), masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966), dan masa Orde Baru (1966-1998). Buku ini digunakan penulis dalam skripsi karena membahas perkembangan keterlibatan ABRI dalam sosial politik tahun 1945-1959.

Sejarah Nasional Indonesia jilid VI, buku ini ditulis oleh Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1993. Buku ini berisi tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia, masa perang kemerdekaan sampai dengan masa Orde Baru. Penulis menggunakan buku ini sebagai acuan penulisan karena di dalamnya memuat masa pemerintahan presidensial dan masa demokrasi liberal, pada masa itu militer mulai memasuki dunia politik.

F. Kajian Teori

Sebelum masuk pembahasan skripsi perlu dijelaskan beberapa konsep yang digunakan dalam penulisan ini. Konsep-konsep tersebut adalah peranan, militer, politik, kekuasaan, dan kepemimpinan. Penjelasan mengenai konsep-konsep ini sangat penting, karena hal ini merupakan landasan berfikir dan pembatasan masalah dalam mengungkapkan peranan militer dalam politik Indonesia (1945-1959).

1. Peranan

Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain.¹³ Peran atau role merupakan cara tertentu yang dilakukan seseorang untuk menjalankan peranan yang dipilihnya.¹⁴ Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia peranan berasal dari kata dasar peran yang artinya pemain sandiwara, tukang lawak, yang berakhiran-an, sehingga dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat menjadi bagian yang memegang peranan utama.¹⁵

Menurut Soerjono Soekanto, peran (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan sebuah peran. Jadi peran di sini dapat diartikan sebagai fungsi seseorang yang terkait dengan kedudukannya dalam sebuah kelompok sosial atau masyarakat.¹⁶

2. Militer

Militer adalah organisasi ketentaraan yang dipimpin seorang komandan.¹⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia militer adalah tentara, anggota tentara atau ketentaraan. Militer merupakan organisasi kekerasan fisik yang sah untuk mengamankan negara atau bangsa dari ancaman luar negeri maupun dalam negeri. Adapun anggota militer adalah seseorang yang direkrut, dilatih dan dipersenjatai untuk menyerang lawan atau bertahan dalam peperangan. Dalam hal ini, militer berfungsi sebagai alat negara yang menjunjung tinggi supermasi sipil.

¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988, hal. 667.

¹⁴ Save. M. Dangun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: LPKN, 1997, hal. 870.

¹⁵ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976, hal. 506.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 286.

¹⁷ Faud, Hassan. *Ensiklopedi Umum untuk Pelajar, Jilid 7*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005, hal. 38.

3. Politik

Menurut Ramelan Surbakti politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat, dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.¹⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia politik diartikan sebagai pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara.

Politik dalam hal ini, militer sebagai badan pertahanan negara ikut mencampuri urusan pemerintahan sipil. Dikarenakan pada masa awal kemerdekaan kedudukan antara pemerintah sipil dengan militer tidak jelas. Anggota militer yang ada kebanyakan bukan berasal dari anggota resmi yang menerima pendidikan militer secara profesional, melainkan kebanyakan dari mereka merupakan masyarakat sipil yang dengan kesadaran individu masuk dunia militer untuk mempertahankan kemerdekaan. Dari sinilah para anggota militer mulai memasuki dunia politik yang saat itu keadannya masih belum stabil dan masih terjadi berbagai pergantian anggota kabinet.

4. Kekuasaan

Menurut Miriam Budiardjo kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku.¹⁹ Menurut Ramlan Surbakti kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan

¹⁸ Ramelan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo, 1992, hal. 6.

¹⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1982, hal. 35.

kehendak yang mempengaruhi.²⁰ Sehingga dapat disimpulkan kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain agar bertindak dan berpikir sesuai kehendak pelaku.

Kekuasaan yang dimiliki seorang pemimpin, baik dikalangan sipil maupun militer hendaknya dapat digunakan untuk dapat mensejahterakan rakyat bukan untuk menunjang kepentingan pribadi/ golongan tertentu pemilik kekuasaan.

5. Kepemimpinan

Menurut Sugiono kepemimpinan adalah kombinasi berbagai atribut pribadi yang dihormati orang-orang lainnya dan memungkinkan orang tersebut membentuk pola perilaku kolektif suatu kelompok menuju ke arah yang ditentukan berdasarkan nilai-nilai dirinya. Konsep ini erat hubungannya dengan otoritas dan pengaruh. Keefektifan kepemimpinan politik tergantung pada ciri-ciri pribadi pemimpin, kondisi lingkungan, persepsi terhadap peran statusnya, dan keunikan situasi sekitarnya.²¹

Dalam bukunya, Sartono Kartodirjo mengungkapkan mengapa kepemimpinan perlu dikaji. Hal ini karena menjadi anggapan umum bahwa kekuasaan penggerak masyarakat terdapat pada pemimpin. Konsep tentang kepemimpinan ini perlu diterangkan dalam hubungannya dalam berbagai konteks sosial dan politik, kedudukan dan peranannya dalam masyarakat tradisional, modern, atau yang sedang mengalami transisi ke arah modern.²² Dari sini dapat dilihat suatu gerakan sosial dalam masyarakat dapat muncul bila terdapat peranan dari seseorang yang

²⁰ Ramlan Surbakti, *op. cit.*, hal. 2.

²¹ Sugiona, dkk, *Kamus Ilmu Politik*, Jakarta: Depdikbud, 1985, hal. 12.

²² Sartono Kartodrdjo (peny), *Kepemimpinan dalam Dimensi Sosial*, Jakarta: LP3IS, 1984, hal. v.

memimpin gerakan tersebut atau dengan kata lain peranan dari seorang pemimpin sangatlah besar bagi gerakan sosial.

G. Metode dan Pendekatan

1. Metode Penelitian

Dalam rangka penulisan skripsi, penulis menggunakan metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Metode ini sangat bermanfaat bagi sejarawan untuk merekonstruksi masa lampau secara imajinatif berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh melalui historiografi.²³ Metode penulisan yang digunakan adalah metode deskriptif analitis, yaitu suatu metode penulisan sejarah yang menguraikan kejadian atau fakta dari peristiwa masa lalu berdasarkan hubungan sebab akibat. Tujuan dari metode deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²⁴

Adapun tahap-tahap yang digunakan penulis dalam penelitian sejarah mencakup empat tahapan, yaitu:

a. Heuristik (pengumpulan sumber)

Setelah menentukan topik, langkah selanjutnya dalam penelitian sejarah adalah Heuristik atau pengumpulan sumber. Heuristik adalah proses pengumpulan sumber yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, baik itu

²³ Louis Gottschalk, *op. cit.*, hal. 32.

²⁴ Moh. Natsir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 63.

berupa sumber primer maupun sumber sekunder.²⁵ Bahan pustaka yang dijadikan sebagai sumber dibedakan menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

Adapun sumber primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah *Tentara Nasional Indonesia I* ditulis oleh A.H. Nasution, *soal- soal politik militer di Indonesia* ditulis oleh T. B. Simatupang, *kekarjaan ABRI* ditulis oleh A.H. Nasution. Sedangkan sumber sekunder yang digunakan dalam penulisan ini diantaranya *perkembangan militer dalam politik di Indonesia 1945-1966* ditulis oleh Yahya A Muhaimin, *Nasution Dwifungsi ABRI dan kontribusi kearah reformasi politik* ditulis oleh Hendri Supriyatmo, *politik militer Indonesia 1945-1967* ditulis oleh ULF Sundhaussen, *dwifungsi ABRI perkembangan dan peranannya dalam kehidupan politik di Indonesia* ditulis oleh Subijono, *dkk, pejuang dan prajurit* ditulis oleh Nugroho Notosusanto, *Peristiwa 3 Juli 1946 (Menguak Kudeta Pertama dalam Sejarah Indonesia)* ditulis oleh Zara M. Yuanda, dan lain-lain.

b. Verifikasi (kritik sumber)

Tahap selanjutnya adalah Verifikasi atau kritik sumber, yaitu pengujian terhadap data-data yang ada untuk mengetahui apakah data dapat dipertanggungjawabkan keasliannya atau tidak. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui otensitas (keaslian sumber), dan tingkat kredibilitas (bisa dipercaya) sumber tersebut.²⁶ Ada 2 kritik sumber yang digunakan dalam penelitian ini, yakni kritik intern dan kritik ekstern. Kritik intern digunakan untuk meneliti

²⁵ Kuntowijoyo, *op. cit.*, hal. 99-100.

²⁶ *Idem.*, hal. 100.

kebenaran dari isi dokumen yang ada, sedangkan kritik ekstern digunakan untuk mengetahui keaslian sumber yang digunakan dalam penulisan. Kritik intern dilakukan dengan menilai apakah sumber atau data yang diperoleh dapat dipercaya atau tidak, dengan kata lain menilai kebenaran dari isi sumber tersebut.

Kritik intern ini dilakukan dengan cara membandingkan berbagai sumber sehingga didapatkan fakta yang lebih jelas dan lengkap.²⁷ Sedangkan kritik ekstern digunakan untuk mengetahui keaslian sumber yang digunakan untuk penulisan. Kritik ekstern ini dapat dilakukan dengan cara meneliti bahan yang digunakan, sifat bahan, gaya penulisan, bahasa tulisan dan jenis huruf yang digunakan, apakah itu semua membuktikan sumber yang didapat asli atau tidak. Hasil yang didapat dari kritik ini adalah fakta-fakta dasar yang dilakukan untuk merekonstruksi peristiwa.

c. Interpretasi (Analisis Data)

Interpretasi atau analisis data adalah langkah yang dilakukan penulis dalam menafsirkan fakta-fakta yang telah diuji dan penganalisisan sumber untuk menghasilkan suatu rangkaian peristiwa yang teruji kebenarannya. Adapun tujuan dari interpretasi adalah untuk mengurangi unsur subjektivitas dalam penulisan sejarah. Dalam interpretasi terdapat dua kegiatan pokok, yaitu Analisis (menguraikan), dan sintesis (menyatukan) data atau fakta-fakta yang telah terkumpul.²⁸ Dengan kata lain interpretasi merupakan penafsiran terhadap

²⁷ *Ibid.*, hal. 102.

²⁸ *Ibid.*, hal. 103-104.

fakta-fakta yang telah teruji kebenarannya dengan cara menguraikan data-data atau fakta –fakta dan menyatukan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain.

Contoh dari Interpretasi ini terdapat dalam bab IV tentang dampak peranan militer bagi pemerintahan. Dalam mengkaji masalah ini penulis melakukan berbagai analisis dari sumber-sumber yang digunakan. Ini dikarenakan buku yang membahas langsung dampak peranan militer bagi pemerintahan Indonesia tidak terlalu banyak. Sehingga dari sana penulis melakukan analisis data yaitu dengan mencoba mencari keterkaitan antara masalah yang ada, teori –teori atau pendekatan yang digunakan penulis dan penjelasan dari sumber-sumber yang digunakan.

d. Historiografi (penulisan sejarah)

Historiografi merupakan tahap akhir dalam penelitian sejarah, sebab dalam tahap ini sudah menggambarkan peristiwa-peristiwa masa lampau yang mengandung aspek kronologis, sehingga memberi penjelasan dan kemudahan kepada penulis dan pembaca mengenai urutan waktunya.²⁹

Penelitian mengenai peranan militer dalam politik Indonesia (1945-1959) telah melalui tahap-tahap metode penelitian sejarah yaitu: heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Penulisan skripsi ini juga menyangkut hal-hal penting yang diperlihatkan penulis seperti, topik, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan dan daftar pustaka.

2. Pendekatan

²⁹ Sartono Kartodirjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia suatu Alternatif*, Jakarta: Gramedia, 1989, hal. 70.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan multidimensional, yaitu suatu pendekatan yang dalam memaparkan dan menganalisa berbagai peristiwa menggunakan konsep-konsep dari berbagai ilmu sosial yang relevan dengan pokok-pokok kajiannya. Pendekatan multidimensional dalam penulisan ini antara lain: pendekatan historis, politik, psikologis dan ekonomi.³⁰

Pendekatan historis dalam penulisan skripsi ini digunakan untuk mengkaji peranan militer dalam politik Indonesia (1945-1959).

Pendekatan politik digunakan untuk melihat latar belakang militer memasuki dunia politik di Indonesia dan berbagai peranannya dalam dunia politik. Bisa dilihat pada masa perang kemerdekaan tentara sudah berjuang mempertahankan negara dan setelah kemerdekaan diperoleh keadaan pemerintahan belum stabil, terlihat dari berbagai pergantian kabinet yang terjadi dalam waktu singkat serta terjadinya berbagai pemberontakan di daerah menjadikan militer tidak bisa tinggal diam. Sehingga perlahan-lahan militer ikut mencampuri urusan pemerintahan sipil.

Pendekatan psikologis adalah pendekatan yang berorientasi pada tingkah laku manusia, baik di dalam maupun di luar. Melalui pendekatan ini, penulis dapat menguraikan tingkah laku kaum politisi sipil dalam menyikapi keterlibatan militer ke politik.

Pendekatan ekonomi digunakan untuk mengetahui keadaan ekonomi Indonesia tahun 1945-1959. Masa awal kemerdekaan keadaan ekonomi Indonesia

³⁰ Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992, hal. 72.

masih kacau dan terjadi inflasi yang sangat tinggi. Kekacauan ekonomi ini berimbas kepada militer, sehingga militer harus membiayai sendiri kebutuhan ekonominya.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi yang berjudul “Peranan Militer dalam Politik Indonesia (1945-1959)” memiliki sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I Berupa pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan pustaka, kajian teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II Bab ini menguraikan tentang latar belakang peranan militer dalam politik Indonesia.
- BAB III Bab ini menyajikan uraian tentang peranan militer dalam politik Indonesia (1945-1959).
- BAB IV Dalam bab ini akan diuraikan mengenai dampak peranan militer bagi pemerintahan Indonesia.
- BAB V Bab ini menyajikan kesimpulan dari penelitian permasalahan yang telah diuraikan pada bab II, III, IV

BAB II

LATAR BELAKANG PERANAN MILITER

DALAM POLITIK INDONESIA

Untuk mengetahui latar belakang peranan militer dalam politik Indonesia, ada beberapa hal yang perlu dibahas, antara lain: lahirnya Tentara Nasional Indonesia, keadaan keamanan awal kemerdekaan, keadaan ekonomi awal kemerdekaan dan keadaan politik awal kemerdekaan, sehingga terlihat jelas apa saja yang melatar belakangi peranan militer dalam politik Indonesia.

A. Lahirnya Tentara Nasional Indonesia

Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Indonesia yang masih muda ini belum mempunyai tentara yang terorganisir. Tentara- tentara yang ada merupakan bekas dari tentara pada masa pemerintahan Jepang, seperti Peta dan Haiho. Pada saat itu banyak pemuda-pemuda Indonesia yang masuk di dalamnya. Namun setelah Jepang kalah oleh Sekutu, tentara Peta ini dibubarkan dan dilucuti senjatanya, sehingga Indonesia tidak mempunyai tentara yang dapat melindungi negara dari serangan baik dari dalam maupun luar. Masa kekosongan tersebut banyak muncul organisasi-organisasi pemuda yang dikenal dengan laskar. Kelompok ini merupakan kelompok yang tidak mempunyai senjata, tidak terlatih, tidak berdisiplin dan tidak mempunyai pemimpin yang berpengalaman.³¹ Selain itu mereka mempunyai ideologi sendiri dan sering berselisih paham dengan pemerintahan Sukarno.

³¹ ULF Sundhaussen, *op. cit.*, hal. 10.

Sikap laskar yang tidak berdisiplin dan tingkah laku mereka yang sewenang – wenang menimbulkan ketakutan penduduk, sehingga pada sidang PPKI 22 Agustus 1945 Sukarno membentuk sebuah Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP) yang terorganisasi dalam Badan Keamanan Rakyat (BKR).³² BKR sendiri baru dibentuk pada 22 Agustus 1945, BKR bukanlah sebuah organisasi ketentaraan yang resmi melainkan bersifat kerakyatan, yang anggotanya didasarkan atas kesadaran individual. Kebanyakan anggotanya merupakan pemuda-pemuda pelajar dan mahasiswa yang dalam pendudukan Jepang merasa jenuh sehingga ingin merasakan kemerdekaan.

Unsur BKR tidak terdiri dari darat saja akan tetapi terdapat pula unsur dari udara dan laut. Para bekas *Kyugun Heiho* serta pemuda yang bekerja pada obyek vital di pelabuhan-pelabuhan maupun jawatan-jawatan pelayaran membentuk BKR penjaga pantai. Sementara pemuda bekas anggota badan penerbangan Belanda (ML, MLD, VVC) dan pemuda bekas anggota kesatuan penerbangan Jepang seperti *Rikigun Koku Butai*, *Koigun Koku Butai*, dan *Nampo Koku Kabusyiki* membentuk BKR udara.³³

BKR ini selain terdapat di pusat juga terdapat di daerah, dan berada di bawah pengarahannya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Keberadaan BKR ini sementara waktu dapat digunakan sebagai pertahanan untuk menghadapi Jepang yang ingin mempertahankan Indonesia sebagai daerah jajahannya. Akan tetapi hambatan terbesar yang dihadapi BKR tidak mempunyai komando yang terpusat yang dapat mengangkat anggota-anggota korps perwira mencapai tingkat efisiensi

³² Arsen Nasution, *Regiositas TNI (Refleksi Pemikiran dan Kepribadian Jenderal Besar Sudirman)*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hal. 97.

³³ Nugroho Notosusanto (ed), *Pejuang dan Prajurit*, Jakarta: Sinar Harapan, 1984, hal. 38.

militer yang lebih tinggi, seringkali kesatuan –kesatuan memilih sendiri komandan mereka akibatnya komandan tidak lebih dari pemimpin sesamanya.

Kedatangan pasukan Sekutu September 1945 menjadikan BKR mengalami kesulitan dalam upaya mengkoordinasikan perjuangan melawan Sekutu. Hal ini disebabkan, dalam menentukan arah perjuangan bangsa Indonesia memiliki dualisme kekuatan senjata, yakni BKR dan badan perjuangan yang tidak tergabung dalam BKR seperti Angkatan Pemuda Indonesia (API), Barisan Buruh Indonesia (BBI), Persatuan Pemuda Pelajar Indonesia (PPPI), Pemuda Penyongsong Republik Indonesia (PPRI), Hisbullah dan Sabilillah.³⁴ Ketidakstabilan dalam tubuh BKR ini memaksa pemerintah menentukan sikap agar Indonesia tidak dijajah kembali. Selain itu para pemimpin negara juga menyadari bahwa pentingnya Angkatan Perang dalam mempertahankan kemerdekaan.

Untuk itu pada 5 Oktober 1945 dikeluarkan Maklumat Pemerintah No:2/X/1945 yang berisi “Untuk memperkuat peranan keamanan umum, maka diadakan suatu Tentara Keamanan Rakyat (TKR)”³⁵. Bekas Mayor Urip Soemohardjo disertai tugas untuk membentuk tentara, beliau diangkat sebagai Kepala Staf Umum TKR dengan pangkat Letnan Jenderal. Letnan Jenderal Urip Soemohardjo berhasil mendasarkan Markas Tertinggi TKR di Yogyakarta.

Konferensi pertama antara para komandan divisi dan resimen TKR diadakan di Yogyakarta pada 12 November 1945 dipimpin oleh Letnan Jenderal Urip Soemohardjo. Dalam pertemuan ini antara lain diadakan pemilihan Panglima Besar dan Menteri Keamanan Rakyat. Terpilih sebagai Panglima Besar ialah Kolonel

³⁴ *Ibid.*, hal. 39.

³⁵ M. Yuanda Zara, *Peristiwa 3 Juli 1946 (Menguak Kudeta Pertama dalam Sejarah Indonesia)*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2009, hal. 45.

Soedirman yang pada waktu itu menjabat sebagai Panglima Divisi V/ Banyumas dan sebagai Menteri Keamanan Rakyat terpilih Sultan Hamengku Buwono IX.³⁶ Pengesahan jabatan Panglima Besar Soedirman baru ditetapkan pada 18 Desember 1945, sedangkan usul Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Menteri Keamanan Rakyat tidak dapat diterima pemerintah.³⁷ Setelah lahirnya TKR ini maka BKR, Peta, KNIL, Haiho dan laskar-laskar lainnya oleh KNIP dilakukan penyatuan di bawah TKR.³⁸

Semakin banyaknya pasukan Belanda yang membonceng pasukan Inggris, markas tertinggi TKR pada 1 Januari 1946 merubah Menteri Keamanan Rakyat menjadi Menteri Pertahanan dengan isyarat bahwa kementerian mendapat tanggung jawab yang lebih jelas. Selain itu Tentara Keamanan Rakyat juga diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat, namun hal tersebut belum memuaskan. Pernyataan Nasution berikut ini menggambarkan ketidakpuasan kalangan tentara pada masa itu. "Kita tidak puas dengan TKR, kita tetap menghendaki tentara untuk pertahanan, yaitu tentara yang tidak hanya mengutamakan segi 'keamanan' (polisional), tetapi tentara yang benar-benar bersifat 'pertahanan' (militer)".³⁹

Pemerintah mengeluarkan Maklumat pemerintah 26 Januari 1946 mengganti Tentara Keselamatan Rakyat menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). TRI ini

³⁶ H. Arsen Nasution. M.Ag, *op. cit.*, hal. 20.

³⁷ Subijono. dkk, *Dwifungsi ABRI: Perkembangan dan Peranannya dalam Kehidupan Politik di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1997, hal. 11.

³⁸ Muhammad Rusli Karim, *op. cit.*, hal. 23.

³⁹ Yahya A. Muhaimin, *op. cit.*, hal. 25 ; A.H. Nasution, *TNI 1 (cetakan kedua)*, Jakarta: Ganeco, 1968, hal. 123-124.

sifatnya nasional dan sekaligus merupakan satu-satunya organisasi militer di Indonesia.⁴⁰

Dikarenakan dalam menghadapi Belanda antara pihak militer, pemerintah, dan laskar-laskar rakyat tidak sejalan dan berjalan dengan ideologinya masing-masing, maka untuk mengatasi kemelut yang terjadi dalam tubuh militer ini pada 5 Mei 1947 pemerintah mengeluarkan dekrit presiden/ panglima tertinggi yang diketuai oleh presiden dan beranggotakan 21 orang “Panitia Pembentukan Organisasi Tentara Nasional Indonesia”. Panitia tersebut menghasilkan keputusan yang dimuat dalam penetapan presiden yang dikeluarkan pada 7 Juni 1947. Panitia inilah yang membentuk suatu organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai penyempurna TRI dan menetapkan:

1. Mulai 3 Juli 1947 kami sahkan dengan resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia.
2. Setiap anggota Angkatan Perang yang ada sekarang dan segenap anggota laskar yang bersenjata, baik yang sudah atau yang tidak bergabung di dalam Biro Perjuangan, mulai saat ini dimasukan serentak ke dalam Tentara Nasional Indonesia.
3. Pimpinan Tertinggi dari Tentara Nasional Indonesia dipegang oleh:
Petunjuk Pimpinan Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari:
 1. Kepala : Panglima Besar Angkatan Perang
 2. Anggota : Letnan Jenderal Urip Sumoharjo
 3. Anggota : Laksaman Muda Nazir

⁴⁰ Muhammad Rusli Karim, *op. cit.*, hal. 23.

4. Anggota : Komodor Muda S. Suriadarma
 5. Anggota : Sutomo
 6. Anggota : Ir. Sakirman
 7. Anggota : Jokowi.
4. Petunjuk pimpinan Tentara Nasional Indonesia menjalankan tugas kewajiban yang mengenai siasat dan organisasi Tentara Nasional Indonesia. Selama proses penyempurnaan Tentara Nasional Indonesia sedang berjalan.
 5. Semua satuan-satuan Angkatan Perang dan satuan-satuan laskar yang mulai hari tanggal penempatan ini menjelma menjadi satuan Tentara Nasional Indonesia, diwajibkan taat dan tunduk pada segala perintah dan instruksi yang dikeluarkan oleh pucuk pimpinan Tentara Nasional Indonesia.⁴¹

Sehingga setelah Juni 1947 semua kekuatan bersenjata reguler maupun ireguler ini dileburkan ke dalam angkatan bersenjata yang benar-benar bersifat nasional.

B. Keadaan Keamanan Awal Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka keadaan keamanan dalam negeri dan luar negeri masih mengalami kekacauan. Setelah Perang Dunia II berakhir dengan kekalahan pihak Jepang terhadap Sekutu maka berdampak terjadinya *vacum of power* di Indonesia. Kemudian pihak Sekutu mengirimkan pasukan ke Indonesia dengan tugas untuk melucuti senjata tentara Jepang, membebaskan para tawanan yang ditahan Jepang, serta memulangkan tentara Jepang ke negaranya. Namun kedatangan Sekutu ini mendapat perlawanan dari rakyat Indonesia dan dari tentara.

⁴¹ A. H. Nasution, *op. cit.*, hal. 86-87.

Perlawanan yang dilakukan oleh tentara dikarenakan tentara menganggap bahwa pasukan Sekutu tidak semata-mata melucuti senjata Jepang tetapi juga akan banyak mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Penyebab kecurigaan pihak tentara pada pasukan Sekutu diawali dengan kedatangan pasukan Sekutu yang secara diam-diam atau rahasia lewat laut dan udara, serta kedatangan tentara Sekutu juga membawa misi mengembalikan Indonesia kepada pemerintah Belanda sebagai jajahannya. Ini terlihat dari penyelundupan pasukan Belanda ke Indonesia oleh Sekutu dengan cara dicat warna kulitnya sehingga menyerupai warna kulit serdadu Gurkha⁴², hal ini diketahui dari bangkai mereka yang terlempar di sungai Brantas ketika berkobar pertempuran Surabaya, November 1945. Disamping itu memang ada sejumlah perwira Belanda yang diterjunkan sebagai pasukan perintis masuknya pasukan Sekutu dengan menggunakan seragam Sekutu.⁴³

Kecurigaan militer terbukti kedatangan Sekutu ini diboncengi pasukan NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*). Hal itulah yang meledakan kemarahan rakyat Indonesia, terbukti dengan adanya peristiwa Ambarawa. Berawal dari kedatangan tentara Sekutu untuk membebaskan tentara Belanda, namun Sekutu justru mempersenjatai tentara Belanda dan terjadi perlawanan terhadap Sekutu. Akhirnya terjadi peristiwa Ambarawa dan peristiwa ini berakhir pada 16 Desember 1945.⁴⁴ Selain itu pertempuran hebat untuk mempertahankan negara juga terjadi pada

⁴² Serdadu Gurkha merupakan satuan-satuan tentara Inggris yang berkebangsaan India, G. Moedjanto, *Indonesia Abad ke-20 jilid 1 (Dari Kebangkitan Nasional sampai Linggarjati)*, Yogyakarta: Kanisius, 1988, hal. 99.

⁴³ *Ibid.*, hal. 99-100.

⁴⁴ A.B. Lopian, dkk, *Terminologi Sejarah 1945-1950 & 1950-1959*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1996, hal. 78.

peristiwa 10 November 1945 di Surabaya yang dikenal dengan pertempuran Surabaya.

Berbagai pertempuran yang terjadi ini sebagai bentuk usaha mempertahankan negara dari penjajah yang berusaha mengembalikan kekuasaannya yaitu dengan cara tidak mengakui negara Republik Indonesia baik secara *de facto* maupun *de jure*. Melihat keadaan seperti itu pemerintah tetap saja dengan kehendaknya untuk melakukan jalan diplomasi dalam menyelesaikan masalah-masalah dengan Sekutu maupun Belanda. Jalan diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah seperti melakukan Perundingan Linggarjati, Perundingan Renville, dan Perundingan Roem Royen.

Jalan diplomaasi yang dilakukan pemerintah tidak membuahkan hasil, dikarenakan pihak Belanda tidak menyetujui isi perjanjian. Seperti dilihat pada Perundingan Linggarjati, gubernur Van Mook tidak mengakui lagi Perundingan Linggarjati yang akhirnya meletus Agresi Militer Belanda I pada 21 Juli 1947. Walaupun dari berbagai perundingan tidak membuahkan hasil yang memuaskan, namun dari Perundingan Linggarjati pada 15 November 1945 inilah pengakuan kedaulatan secara *de facto* oleh berbagai negara penting didapatkan, seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, India, Pakistan, dan lain-lain.⁴⁵

Setelah melakukan Agresi I, Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia melakukan agresinya yang kedua, dikenal dengan Agresi Militer Belanda II pada 19 Desember 1948. Belanda menduduki ibu kota Yogyakarta dan menawan presiden, wakil presiden serta para staf menteri, sehingga Belanda menganggap dengan jatuhnya ibu kota Yogyakarta pasukan TNI sudah habis. Namun perkiraan Belanda

⁴⁵ Aboe Bakar Loebis, *Kilas Balik Revolusi (Kenangan, Pelaku dan Saksi)*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, hal. 183.

meleset TNI masih ada dan pemerintah sudah mengirimkan mandat untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).

Presiden Sukarno sebelum ditawan mengirimkan surat berisi pemberian kekuasaan negara kepada menteri kemakmuran Syafruddin Prawiranegara yang sedang mengadakan perjalanan ke Sumatra untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Selain itu presiden juga memerintahkan Sudarsono, Palar dan Maramis yang ada di New Delhi untuk membentuk pemerintahan Pelarian (*Exile Government*).⁴⁶ Sehingga beberapa bulan sebelum Belanda melakukan serangan, Jenderal Sudirman yang sedang sakit memimpin para prajuritnya dalam perang gerilya.

Koordinasi yang sudah matang inilah, militer mulai menyerang daerah-daerah yang dikuasai oleh Belanda yang dikenal dengan serangan umum 1 Maret 1949 terhadap Yogyakarta yang dipimpin Kolonel Suharto dan berhasil menduduki Yogyakarta selama 6 jam. Kemenangan ini membuktikan kepada dunia Internasional bahwa Indonesia masih ada dan TNI membuktikan keberadannya untuk melindungi negara.

Kemenangan Indonesia pada Agresi Militer Belanda II, mengakibatkan Belanda mendapat tekanan dari PBB dan dituntut untuk mengembalikan Indonesia. Untuk itu Pemerintah Belanda dipertemukan dalam Perundingan Roem-Royen pada 7 Mei 1949, kemudian pada 23 Agustus sampai 2 November 1949 diadakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag Belanda. Melalui perundingan tersebut

⁴⁶ G. Moedjanto, *Sejarah Indonesia II*, Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1975, hal. 137.

Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Republik Indonesia pada 27 Desember 1949.⁴⁷

C. Keadaan Ekonomi Awal Kemerdekaan

Kondisi perekonomian juga ikut mempengaruhi kondisi politik di Indonesia, keadaan ekonomi pada waktu itu masih sangat kacau selain belum stabilnya kondisi keamanan dan politik, serta masih terjadi berbagai gejolak. Inflasi yang sangat parah menimpa negara yang baru beberapa bulan merdeka disebabkan mata uang pendudukan Jepang beredar secara tidak terkendali. Pemerintah pada saat itu tidak bisa berbuat apa-apa dengan keadaan yang memburuk, karena belum memiliki mata uang sendiri sebagai mata uang pengganti. Inflasi ini menimbulkan penderitaan yang begitu berat bagi bangsa Indonesia terutama dikalangan petani mengingat mereka yang paling banyak menyimpan mata uang Jepang.

Kas negara juga mengalami kekosongan yang disebabkan tidak seimbangannya antara pemasukan dan pengeluaran, pemasukan dari pajak dan bea masuk lainnya sangat kecil sedangkan pengeluaran negara semakin bertambah. Melihat hal ini pemerintah mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan tertentu dengan menyatakan bahwa beberapa uang masih berlaku sebagai pembayaran yang sah di wilayah Republik Indonesia, antara lain: mata uang *De Javasche Bank*, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang.⁴⁸

Keadaan bangsa Indonesia diperburuk lagi dengan adanya blokade-blokade laut yang dilakukan oleh Belanda, dengan cara menutup pintu perdagangan Indonesia.

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 155.

⁴⁸ Soemitro Djojohadikoesoemo, *Beberapa soal keoeangan*, Djakarta, 1947, hal. 27. Dalam Marwati Djoened Poesponegoro, dkk, *Sejarah Nasional Indonesia jilid VI*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984.

Akibatnya barang-barang milik pemerintah Indonesia tidak dapat diekspor dan barang-barang yang akan masuk ke Indonesia juga tidak bisa, sehingga Indonesia kekurangan bahan-bahan impor yang sangat dibutuhkan.

Alasan Belanda melakukan blokade terhadap Indonesia antara lain:⁴⁹

1. Mencegah masuknya senjata dan peralatan militer ke Indonesia.
2. Mencegah keluarnya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik pengusaha asing lainnya.
3. Melindungi bangsa Indonesia dari tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh bukan bangsa Indonesia.

Berbagai usaha dilakukan untuk menembus blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda, diantaranya melalui usaha yang bersifat politis dan usaha yang bersifat ekonomis.

a. Usaha bersifat politis

Pemerintah Indonesia bersedia membantu India yang sedang tertimpa bencana kelaparan dengan mengirimkan beras sebanyak 700.000 ton ke India.⁵⁰ Sebagai imbalannya pemerintah India menjanjikan mengirimkan bahan pakaian dan obat-obatan yang sedang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Usaha pemerintah dalam bidang politik ini bisa dikatakan berhasil, terbukti India menjadi negara di Asia yang paling aktif membantu Indonesia dalam perjuangan diplomatik di forum-forum Internasional.

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 173.

⁵⁰ G. Moedjanto, *op. cit.*, hal. 110. ; P. R. S. Mani, *Jejak Revolusi 1945 (Sebuah Kesaksian Sejarah)*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989, hal. 124.

b. Usaha bersifat ekonomis

Pemerintah Indonesia melakukan hubungan dagang langsung dengan pihak luar negeri, usaha ini dirintis oleh *Banking and Trading Corporation* (BTC) atau Badan Perdagangan Semi Pemerintah yang dipimpin oleh Dr. Sumitro Djojohadikusumo dan Dr. Ong Eng Die.⁵¹ BTC ini merupakan usaha perdagangan swasta yang membantu usaha ekonomi pemerintah, BTC ini berhasil mengadakan kontak dengan pengusaha swasta Amerika Serikat. Transaksi pertama Amerika Serikat bersedia membeli barang-barang ekspor Indonesia seperti gula, teh, karet dan yang lainnya. Namun usaha pengeksporan ini digagalkan oleh Belanda karena kapal yang memuat barang-barang ekspor disita.

Pemerintah berusaha menembus blokade melalui Sumatra dengan tujuan utamanya Malaysia dan Singapura melalui perahu layar dan kapal motor cepat yang dilakukan oleh Angkatan Laut Republik Indonesia dengan bantuan pemerintah daerah penghasil barang-barang ekspor. Indonesia sebenarnya sejak tahun 1947 sudah memiliki hubungan dengan Singapura dan memiliki perwakilan resmi yang disebut *Indonesia Office* (Indoff) dan Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri (KPULN). Secara resmi Indoff ini memperjuangkan kepentingan politik luar negeri Indonesia, sedangkan tugas rahasianya yaitu mengendalikan penembusan blokade Belanda dan usaha perdagangan barter, KPULN juga memiliki tugas untuk membeli senjata dan perlengkapan Angkatan Perang serta usaha untuk memasukannya ke Indonesia.

⁵¹ *Ibid.*, hal. 177.

Untuk mengatasi kesulitan ekonomi yang terjadi pada saat itu, usaha yang dilakukan pemerintah yaitu melakukan pinjaman nasional dan mengeluarkan uang kertas baru yaitu Oeang Republik Indonesia (ORI) pada Oktober 1946 sebagai pengganti uang Jepang, dan diikuti pembentukan Bank Negara Indonesia pada 1 November 1946 yang tugasnya mengatur nilai tukar ORI dengan valuta asing yang ada di Indonesia. Selain mengeluarkan uang baru pemerintah juga mengadakan konferensi ekonomi dengan tujuan mencari kesepakatan untuk menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang sangat mendesak seperti masalah produksi dan distribusi bahan makanan, masalah sandang, serta masalah status dan administrasi perkebunan-perkebunan.⁵²

Disusul rencana A.K Gani yaitu membentuk Badan Perancang Ekonomi pada 19 Januari 1947 yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi selama jangka waktu dua tahun sampai tiga tahun. Tugasnya untuk mengkoordinasi dan merasionalisasi semua cabang produksi dalam bentuk badan hukum seperti yang dilakukan pada BPPGN dan PPN.⁵³ Namun rencana A. K. Gani mengalami kegagalan akibat Agresi Belanda I tahun 1947. Usaha lain juga dilakukan oleh menteri urusan bahan makanan I. J. Kasimo dengan programnya Plan Kasimo yaitu usaha untuk swasembada pangan dan menyarankan agar dilaksanakan transmigrasi. Namun pemikiran-pemikiran yang dilakukan belum dapat terlaksana dengan baik karena situasi politik dan militer yang belum stabil.

Keadaan ekonomi Indonesia yang belum stabil, berdampak juga bagi perkembangan militer di Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Untuk pembiayaan

⁵² Marwati Djoened Poesponegoro, dkk, *op. cit.*, hal. 178.

⁵³ *Ibid.*, hal. 180.

perang atau bergerilya militer tidak mendapat dana dari pemerintah, akan tetapi mereka menghidupi sendiri kebutuhan mereka pada masa perang gerilya dengan cara berbaur dengan rakyat. Hal inilah yang menyebabkan militer lebih mandiri dalam pembiayaan perang.

D. Keadaan Politik Indonesia Awal Kemerdekaan.

Seperti halnya keadaan keamanan dan ekonomi yang masih kacau, keadaan politik di Indonesia awal kemerdekaan juga belum stabil. Ketidakstabilan kondisi politik di Indonesia terlihat dari adanya silang pendapat antara pihak pemerintah dengan militer untuk menentukan sikap dalam menghadapi Belanda yang ingin datang kembali menjajah Indonesia. Pemerintah memilih jalan diplomasi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, sedangkan pihak militer memilih jalan peperangan terbuka dengan tentara Belanda.

Adanya pertentangan pendapat antara militer dan pemerintah mengakibatkan perpecahan dalam tubuh militer, sikap pemerintah yang tidak mendukung militer menyebabkan pemimpin-pemimpin tinggi militer banyak yang berniat mengundurkan diri, sampai pimpinan tertinggi Angkatan Perang Jenderal Sudirman mengirimkan surat pengunduran diri dan berhenti dari militer pada Presiden Sukarno sebagai bentuk kekecewannya terhadap pemerintah yang lebih memilih jalan diplomasi, walaupun tidak sampai ditindak lanjuti.

(lihat lampiran 1).

Hal ini dikarenakan sebelum Jenderal Sudirman berniat mengirimkan surat kepada Presiden Sukarno, beliau bersama Nasution terlebih dahulu menemui

presiden pada 2 Agustus 1949 untuk membicarakan bahwa beliau tidak dapat mengikuti putusan pemerintah.⁵⁴ Dalam pertemuan tersebut Presiden Sukarno menjelaskan siasatnya, namun Jenderal Sudirman tetap dengan pendiriannya. Pada akhirnya Presiden Sukarno mengeluarkan perkataan-perkataan yang dapat menahan Jenderal Sudirman. Beliau mengatakan "Kalau pemimpin TNI meletakkan jabatan karena masalah ini kami pun selaku presiden/ panglima tertinggi akan meletakkan jabatan". Beliau mengatakan bahwa dengan sikap TNI yang demikian berarti gagallah politik Sukarno- Hatta yang telah disetujui oleh PDRI, BP KNIP, dan oleh partai-partai. Sukarno- Hatta akan berhenti dan akan mengikuti perjuangan sebagai rakyat biasa, perjuangan terserah kepada pimpinan TNI.⁵⁵

Ditambah lagi kata-kata Nasution kepada Jenderal Sudirman sebelum surat itu dikirimkan. Nasution mempertanyakan, manakah bagi perjuangan seterusnya yang lebih penting "Siasat yang baik, tetapi pecahnya Sukarno-Hatta dan TNI".⁵⁶ Nasution berpendapat bahwa keutuhan persatuan lebih penting dan sebaliknya pecahnya pimpinan nasional dan TNI, akan berarti pecahnya republik yang sedang kita bela kehadirannya. Sambil merenungkan perkataan Presiden Sukarno dan membenarkan kata-kata Nasution, akhirnya surat yang rencananya akan dikirimkan kepada presiden tidak jadi diteruskan.

Selain hubungan sipil dan militer yang kurang harmonis yang dikarenakan adanya perbedaan pandangan diantara mereka, di dalam tubuh pemerintahan sipil sendiri juga mengalami ketidakstabilan. Kabinet yang terbentuk tidak bisa

⁵⁴ A. H. Nasution, *Memenuhi Panggilan Tugas (Jilid 2B: TNI Berposisi Anti Gerilya)*, Jakarta: CV.Haji Masabung, 1994, hal. 19.

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 20.

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 22.

menjalankan peranannya dengan baik. Hal ini terlihat kabinet yang ada hanya bertahan satu sampai dua tahun.

Kabinet Syahrir pertama terbentuk pada 14 November 1945, selain menjadi Perdana Menteri beliau merangkap Menteri Dalam Negeri dan Luar Negeri. Kemudian berturut-turut menjadi Perdana Menteri sampai kabinet Syahrir tiga pada 2 Oktober 1946- 26 Januari 1947. Kabinet Syahrir berupaya mengatasi konflik dengan Belanda melalui jalan diplomasi yaitu Perundingan Linggarjati. Politik perundingan ini menyebabkan Syahrir mendapat tantangan keras terutama dari golongan Persatuan Perjuangan pimpinan Tan Malaka, yang menghendaki sikap yang lebih tegas dalam menghadapi Belanda. Akibat perundingan ini akhirnya Kabinet Syahrir jatuh dan diganti dengan Amir Syarifudin pada 26 Juni 1946.

Amir Syarifudin selain menjadi Perdana Menteri, ia merangkap Menteri Pertahanan sampai Januari 1948. Dalam kedudukannya sebagai Perdana Menteri Amir memimpin delegasi Republik Indonesia (RI) pada Perundingan Renville dan menandatangani hasil perundingan tersebut pada 17 Januari 1948. Dikarenakan Perundingan Renville banyak merugikan bangsa Indonesia, Amir mengembalikan mandatnya kepada presiden dan membentuk FDR (Front Demokrasi Rakyat) pada 26 Februari 1948 dan bergabung dengan PKI yang dipimpin oleh Muso.⁵⁷

Akhirnya presiden menunjuk Moh. Hatta untuk membentuk kabinet yang terbentuk pada 29 Januari 1948 dikenal dengan Kabinet Hatta. Program yang dijalankan juga tidak jauh berbeda dengan kabinet sebelumnya, yaitu melakukan jalan diplomasi untuk menyelesaikan konflik dengan Belanda, selain itu program

⁵⁷ A.B. Lopian, dkk, *op. cit.*, hal. 17.

lainnya seperti melepaskan terbentuknya negara Republik Indonesia Serikat, rasionalisasi dan pembangunan. Masa kabinet Hatta ini berhasil mengadakan KMB (Konferensi Meja Bundar), dari hasil Konferensi Meja Bundar inilah Indonesia berhasil mendapat pengakuan kemerdekaan.

Setelah Republik Indonesia Serikat (RIS) dibubarkan dan Indonesia kembali lagi menjadi NKRI, pergantian kabinet juga masih terjadi silih berganti. Diawali dari Kabinet Natsir pada masa kabinet ini terjadi berbagai pemberontakan di daerah seperti pemberontakan DI/TII dan pemberontakan Andi Aziz. Masa kabinet ini militer berperan aktif untuk melawan pemberontakan, karena jalan damai yang diusahakan pemerintah tidak berhasil. Karena masalah Irian Barat tidak berhasil diselesaikan kabinet, maka pada 21 Maret 1951 Natsir mengembalikan mandatnya kepada presiden.

Berakhirnya kabinet Natsir kemudian diganti oleh Kabinet Sukiman, namun kabinet ini juga tidak bertahan lama karena masalah dengan Irian Barat belum bisa diatasi dan hubungan dengan militer kurang harmonis. Kabinet ini kemudian diganti dengan Kabinet Wilopo, masa kabinet ini hubungan dengan militer semakin tidak harmonis dengan puncaknya terjadi peristiwa 17 Oktober 1952. Kalangan militer menganggap sikap DPR Sementara itu tidak wajar dan dirasakan sebagai intervensi langsung dalam soal intern TNI-AD.⁵⁸ Akibat peristiwa ini kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun, pada 2 Juni 1953 Wilopo mengembalikan mandatnya kepada presiden.

⁵⁸ Marwati Djoened Poesponegoro, dkk, *op. cit.*, hal. 249.

Kabinet selanjutnya adalah Kabinet Ali Sastroamijoyo I. Kabinet ini juga tidak bertahan lama, buntut peristiwa 17 Oktober 1952 dengan pengunduran Nasution menjadikan terjadinya pergantian KSAD. Karena tidak ada pengganti yang cocok terjadi berbagai kemelut dalam kabinetnya terutama dengan Angkatan Darat. Sehingga kabinet ini dinilai gagal dan mengembalikan mandatnya kepada presiden 25 Juli 1955. Kabinet Ali digantikan oleh Kabinet Burhanudin Harahap pada 12 Agustus 1953. Salah satu program kabinet ini adalah mengembalikan kewibawaan moral pemerintah, dalam hal ini kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat terhadap pemerintah.⁵⁹ Ia berhasil mengangkat kembali Nasution sebagai KSAD dan mengadakan pemilu pertama sejak Indonesia merdeka. Karena kabinet Burhanudin ini hanya kabinet peralihan dari DPR Sementara ke DPR hasil pemilu, kabinet ini mengembalikan mandatnya kepada presiden 3 Maret 1956.

Setelah pemilu presiden menunjuk kembali Ali Sastroamijoyo untuk membentuk kabinet yang dikenal dengan Kabinet Ali Sastroamijoyo II. Pada masa kabinet ini terjadi gerakan sparatisme yang dilakukan oleh PRRI/ Permesta menuntut dibubarkannya kabinet. Masa kabinet ini antara sipil dan militer terjadi kerja sama untuk menyelesaikan berbagai pemberontakan. Namun dengan berbagai peristiwa yang terjadi, Ali merasa lelah dan menyerahkan mandatnya pada presiden 14 Maret 1957. Terakhir yaitu Kabinet Djuanda atau Kabinet Karya yang memerintah Indonesia dengan program kabinetnya, yaitu:⁶⁰

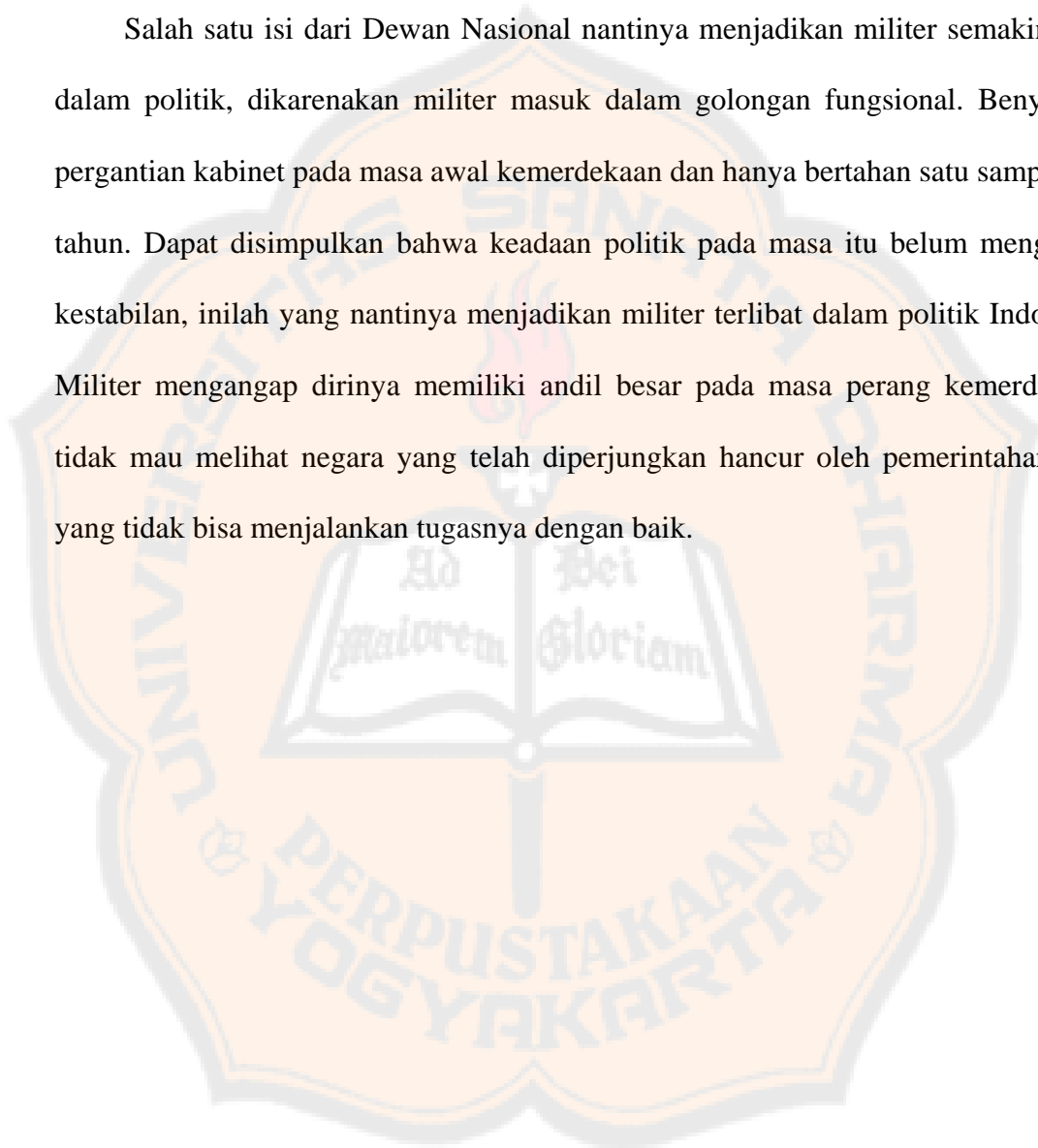
1. Membentuk Dewan Nasional (sesuai dengan konsepsi presiden)
2. Normalisasi keadaan RI

⁵⁹ A.B. Lopian, dkk, *op. cit.*, hal. 177.

⁶⁰ G. Moedjanto, *op. cit.*, hal. 34.

3. Menjalankan pelaksanaan pembatalan KMB
4. Perjuangan Irian Barat
5. Mempercepat pembangunan.

Salah satu isi dari Dewan Nasional nantinya menjadikan militer semakin aktif dalam politik, dikarenakan militer masuk dalam golongan fungsional. Banyaknya pergantian kabinet pada masa awal kemerdekaan dan hanya bertahan satu sampai dua tahun. Dapat disimpulkan bahwa keadaan politik pada masa itu belum mengalami kestabilan, inilah yang nantinya menjadikan militer terlibat dalam politik Indonesia. Militer menganggap dirinya memiliki andil besar pada masa perang kemerdekaan, tidak mau melihat negara yang telah diperjuangkan hancur oleh pemerintahan sipil yang tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik.



BAB III

PERANAN MILITER DALAM POLITIK INDONESIA

(1945-1959)

Kedanaan politik, ekonomi dan militer yang masih belum stabil dan masih mengalami kekacauan awal kemerdekaan mendorong militer untuk terlibat. Militer merasa bahwa mereka pihak yang paling berjasa dalam masa perang kemerdekaan. Untuk itu mereka merasa berhak campur tangan mengurus urusan di luar militer, dalam hal ini mengenai politik. Untuk lebih lengkapnya dalam bab ini akan diuraikan berbagai peranan militer, mulai dari masa Perang Kemerdekaan (1945-1949), sampai masa Demokrasi Liberal (1949-1959).

A. Masa Perang Kemerdekaan (1945-1949)

1. Masuknya militer dalam politik Indonesia

Tentara semenjak zaman perjuangan sampai datangnya kemerdekaan selalu berfungsi sebagai pertahanan negara. Tugasnya melindungi negara dari bahaya yang dapat mengancam eksistensi keutuhan wilayah Indonesia baik dari dalam maupun dari luar.

Peranan militer yang seharusnya hanya menjaga dan mempertahankan negara lama kelamaan mengalami perubahan. Peranan ini berjangkar pada proses awal perjalanan sejarahnya, dikarenakan adanya persepsi mengenai tentara sebagai kekuatan politik berasal dari perbedaan kabur tentang fungsi militer dan fungsi politik masa perang kemerdekaan melawan Belanda. Masa perang kemerdekaan tentara hanya mengandalkan kekuatan penduduk setempat, tanpa bekal suatu latihan

kemilteran serta kurangnya persenjataan modern mengakibatkan perlawanan terhadap Belanda dalam bentuk perang gerilya dan para pejuang perang gerilya diorganisasi ke dalam satuan-satuan pengelompokan politik.⁶¹

Anggota militer yang berasal dari bekas tentara pada masa penjajahan Jepang dan lasyar-laskar rakyat yang tidak mengenyam pendidikan militer secara profesional menjadikan mereka terjun dalam dunia politik dengan memasuki dan menjadi salah satu anggota organisasi politik. Ini dikarenakan tentara yang dilatih Jepang menganggap tidak perlu enggan untuk terlibat dalam dunia politik, berbeda dengan lulusan Belanda yang bertolak dari paham barat yang mengindoktrinasi agar tentara bersikap netral dalam politik,⁶² sehingga setelah Indonesia merdeka kalangan militer khususnya para perwira yang ikut berjuang dalam perang kemerdekaan, mulai menuntut suara mereka harus didengar dalam urusan politik.

Adanya kesenjangan kultur, terlihat dari para pemimpin pemerintah kebanyakan kelompok elit dan pernah mengenyam pendidikan Belanda, sedangkan kebanyakan para tentara berasal dari kota-kota kecil di Jawa dan hanya mengenyam pendidikan rendah (sekolah kelas dua) dan sedikit yang menguasai bahasa Belanda. Kesenjangan ini diperburuk lagi dengan sikap tentara yang menganggap mereka mempunyai hak yang sama dengan golongan sipil dalam pemerintahan untuk menentukan bagaimana perjuangan harus dilaksanakan.

Setelah memilih panglima besar sendiri, para pemimpin tentara terjun ke dalam berbagai kelompok politik untuk menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap pemerintah yang memberikan peluang terhadap Belanda dengan mengadakan

⁶¹ Harold, Crouch, *op. cit.*, hal. 22.

⁶²*Ibid.*, hal. 23.

perundingan. Pemerintah yang dipimpin oleh kaum politik tua lebih menitikberatkan kepada perjuangan diplomasi, sedangkan pimpinan tentara yang tergolong kaum muda lebih menitikberatkan pada perjuangan dengan menggunakan kekuatan bersenjata.⁶³

Pemimpin-pemimpin pemerintah yang tetap memilih melalui perjuangan diplomasi dalam menghadapi Belanda, dianggap oleh para pejuang gerilya sebagai suatu pengkhianatan, karena mereka berjuang dengan resiko kehilangan nyawa untuk mendapatkan kemenangan. Perbedaan strategi ini pula yang melatar belakangi sikap keengganan pihak tentara untuk tunduk sepenuhnya kepada kebijaksanaan-kebijaksanaan dan persetujuan-persetujuan sebagai hasil perundingan pemerintah Republik Indonesia dengan pihak Belanda.⁶⁴

2. Peranan militer dalam politik.

a. Awal terbentuknya Kabinet Sjahrir.

Peranan militer pertama terlihat pada saat awal terbentuknya Kabinet Sjahrir. Masa Kabinet Sjahrir hubungan dengan militer kurang harmonis, terutama dengan Sudirman. Berawal dari pernyataan Sjahrir mengenai kolaborator Jepang, Sudirman tersinggung karena pasukan Pembela Tanah Air (PETA) yang dipimpinnya merupakan bentukan Jepang.⁶⁵

Sudirman kemudian bergabung dalam Persatuan Perjuangan di bawah pimpinan Tan Malaka. Sudirman menganggap Sjahrir mengkhianati cita-cita proklamasi karena menyodorkan opsi pengakuan kemerdekaan hanya wilayah Jawa dan Madura saja,

⁶³ A. H. Nasution, *TNI 1 (cetakan ke-2)*, Djakarta: Ganaco, 1963, dalam Subijono, dkk, *Dwifungsi ABRI: Perkembangan dan Peranannya dalam Kehidupan Politik di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hal. 21.

⁶⁴ *Ibid.*, hal, 12.

⁶⁵ Adam Malik, *Mengabdi Republik Jilid II: Angkatan 45*, Jakarta: Gunung Agung, 1978, hal. 155.

serta pembentukan Republik Indonesia Serikat.⁶⁶ Sudirman menilai perundingan dengan Belanda tidak cukup efektif dalam memperjuangkan kedaulatan Republik Indonesia. Dukungan Sudirman terhadap Tan Malaka ditunjukkan dengan kehadirannya dalam Kongres Persatuan Perjuangan yang diadakan di Surakarta, pada 15 dan 16 Januari 1946. Bentuk dukungan itu ditunjukkan dalam pidatonya yang berbunyi "Lebih baik kita diatom dari pada merdeka kurang dari 100%".⁶⁷

Masalah kabinet dengan militer yang lain timbul pada saat pengangkatan komandan divisi. Pengangkatan ini sebagian dipilih oleh Komandan Resimen (Dan Men) dan sebagian lagi diangkat oleh Menteri Pertahanan. Kekacauan terlihat di divisi III Yogyakarta dan divisi IV Surakarta, komandan divisi III Mayjen Sudarsono menolak pengangkatan Letkol Sarbini (Dan Men Magelang) menjadi kepala stafnya. Sementara itu Menteri Pertahanan mengangkat Mayjen Sudiro menjadi komandan divisi IV, namun komandan lama, yakni Kolonel Sutarto tidak mau diganti dan karirnya dinaikan menjadi Mayjen.⁶⁸ Pada dasarnya pertentangan dari militer terhadap Kabinet Sjahrir juga bermuatan politik, terutama Sudarsono dan Sutarto yang mempunyai kepentingan untuk mempertahankan posisinya. Hal inilah yang menyebabkan mereka kemudian bergabung dengan oposisi.

Meskipun sudah terjadi penangkapan terhadap anggota Persatuan Perjuangan, namun hal ini tidak menjadikan oposisi ini bubar, apalagi setelah mengetahui perkembangan diplomasi yang menurut mereka mengecewakan. Ditambah dengan pidato Wakil Presiden Mohammad Hatta yang menyampaikan hasil perundingan

⁶⁶ *Persatuan Para Kolaborator*, dalam *Majalah Tempo Edisi Khusus 100 Tahun Sjahrir*, Edisi 9-15 Maret 2009, hal. 73.

⁶⁷ M. Yuanda Zara, *op. cit.*, hal. 88.

⁶⁸ A. H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid III: Diplomasi Sambil Bertempur*, Bandung: Disejarah- AD dan Angkasa, 1977, hal, 105.

Sjahrir dengan Belanda, serta menyatakan dukungan terhadap Sjahrir. Setelah mendengar pidato Hatta, sejumlah tokoh yang tidak sejalan dengan pemerintah mengadakan pertemuan di rumah Penasehat Panglima Devisi III Budhyarto Martoatmojo di Baciro, Yogyakarta. Pertemuan ini diadakan untuk membahas isi pidato Hatta, tokoh-tokoh yang hadir antara lain Buntaran, Sutarjo, Chaerul Saleh, Iwa Kusuma Sumantri, Sayuti Melik, Jenderal Marjohan, Jenderal Sudarsono, dan Mayor A. K. Yusuf.⁶⁹

Setelah pertemuan selesai A. K. Yusuf menyatakan kekesalannya terhadap Sjahrir dan berencana untuk menyingkirkan Sjahrir. Rencana tersebut disetujui oleh Jenderal Sudarsono dan kemudian menandatangani surat perintah atas penahanan Sjahrir, dokter Sudarsono dan Abdul Majid.⁷⁰ Rencana tersebut dilaksanakan pada saat perjalanan Sjahrir menuju Yogyakarta untuk menghadiri sidang kabinet. Rencana A. K. Yusuf ini dibantu oleh Panglima devisi IV, Kolonel Sutarto sehingga pada pukul 23. 15, Yusuf memerintahkan Sjahrir dan rombongan untuk mengikutinya dengan acungan senjata, kemudian dibawa ke Paras.⁷¹ Mereka ditempatkan di bawah penjagaan komandan batalyon setempat, yaitu Mayor Sukarto.⁷²

Berita penculikan Sjahrir sampai ke Presiden Sukarno, ia menyatakan bahwa negara dalam keadaan darurat untuk sementara pemerintahan diambil alih oleh presiden. Keesokan harinya, Panglima Besar Sudirman menghadiri sidang pertemuan pimpinan tinggi pemerintahan. Dalam pertemuan tersebut Sukarno, Hatta dan Amir beranggapan bahwa Sudirman mengetahui di mana Sjahrir ditahan. Mereka

⁶⁹ Iwa Kusuma Sumantri, *Sedjarah Revolusi Indonesia, Jilid II: Masa Revolusi Bersendjata*, tanpa tahun dan penerbit, hal.

⁷⁰ G. Moedjanto, *op. cit.*, hal. 172.

⁷¹ Paras merupakan sebuah desa yang terletak di lereng Merbabu, berjarak kira-kira 35 km di sebelah barat Surakarta.

⁷² G. Moedjanto, *op. cit.*, hal. 172-173.

mendesak agar Sudirman melakukan sesuatu untuk pembebasan Sjahrir dan kawan-kawan, namun ia menolaknya. Kemudian Sudirman pergi ke Surakarta dan mengirim perintah pribadi kepada Sudarsono agar melapor kepadanya. Dalam pertemuan dengan Sudarsono, ternyata Sudirman meminta agar tahanan dibebaskan.⁷³ Setelah masalah penculikan selesai tokoh-tokoh politik yang dekat dengan Sudarsono ditahan, seperti Buntara, Budyanto, Chaerul Saleh, Moh. Hatta, Sayuti Melik, Adam Malik, Subarjo, Ibnu Parna, Pandu Kartawiguna dan Sumantoro,⁷⁴ kemudian Sjahrir membentuk kabinet yang ketiga dan melanjutkan diplomasi.

b. Pada saat pemberontakan PKI Madiun 1948

Kebijakan pemerintahan Amir Syarifudin menerima Perjanjian Renville yang ditandatangani pada 17 Januari 1948 sangat merugikan republik, baik bidang politis, ekonomi maupun militer.⁷⁵ Bidang politis, kita harus mengakui kedaulatan Belanda pada wilayah republik yang diduduki Belanda pada agresi pertama. Wilayah kita tinggal 2/3 di Jawa dan 1/5 di Sumatra. Bidang ekonomis, kita menyerahkan kota-kota besar pusat perindustrian dan perdagangan keluar, serta memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Belanda untuk melakukan blokade ekonomi terhadap republik. Bidang militer, kita harus menyerahkan kantong-kantong pertahanan atau kantong gerilya yang telah disusun dengan susah payah kepada musuh. Umumnya kantong gerilya ini dibentuk di Jawa Barat. Menurut perjanjian itu Jawa Barat termasuk daerah Belanda, sehingga kantong gerilya yang dibangun di daerah Jawa Barat harus

⁷³ *Idem.*, hal. 173.

⁷⁴ M. Yuanda Zara, *op. cit.*, hal. 190.

⁷⁵ Saleh, A. Djahhari, *Markas Besar Komando Djawa (1948-1949)*, Djakarta: Lembaga Sejarah Hankam, 1967, hal. 5.

dipindahkan keluar garis Van Mook dan dipindahkan ke daerah republik.⁷⁶ Akibat perjanjian ini dari Jawa Barat dipindahkan sejumlah 22.000 prajurit ke daerah republik, Amir mendapat kecaman dari kalangan oposisi terhadap kabinetnya.

Kegagalan Perjanjian Renville, Amir meletakkan jabatannya pada 23 Januari. Antara Amir dan Syahrir terjadi perpecahan dalam partai Sosialis, Amir bersama Tan Liang Djie dan Abdul Malid membentuk partai sosialis baru yang kemudian menjadi Front Demokrasi Rakyat (FDR) di bawah pimpinan Amir Syarifudin.⁷⁷ Dalam kegiatan politiknya FDR melakukan oposisi terhadap Kabinet Hatta dengan melakukan demonstrasi dan berbagai pemogokan, seperti pemogokan Delanggu pada 5 Juli 1948.⁷⁸

Bersamaan dengan kegiatan FDR, pada Agustus muncul tokoh PKI yang bermukim di Mosko, yaitu Muso. Kedatangan Muso menjadikan FDR bergabung dengan PKI dan Amir Syarifudin menjabat sebagai Sekertaris Urusan Pertahanan. Gerakan oposisi ini terang –terangan menghambat dan menentang pemerintah, mereka melakukan kekacauan, pertempuran dan penculikan-penculikan di kota Solo, antara lain bentrokan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yaitu Barisan Banteng dengan tentara laut yang bersimpati pada PKI dan Pesindo. Dalam mengatasi keadaan, presiden Republik Indonesia (RI) mulai 15 September menyatakan daerah Solo dalam keadaan bahaya dan mengangkat Kolonel Gatot Subroto sebagai Gubernur Militer daerah Istimewa Surakarta dan sekitarnya.⁷⁹

⁷⁶ *Idem.*, hal. 5.

⁷⁷ A.B. Lopian, dkk, *op. cit.*, hal. 130.

⁷⁸ *Idem.*, hal. 130.

⁷⁹ *Ibid.*, hal. 54-55.

Sementara perhatian pemerintah tertuju pada situasi di Solo, pada 18 September 1948 FDR/ PKI melancarkan aksinya di Madiun dengan memproklamasikan berdirinya “Soviet Republik Indonesia”. Mereka berhasil melucuti senjata TNI Madiun, mengganti pejabat-pejabat pemerintah dengan orang-orang PKI, dan melakukan serangkaian pembunuhan dan penangkapan.⁸⁰ Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah menggerakkan TNI untuk merebut kembali Madiun dan sekitarnya yang diduduki PKI. Sementara itu pemerintah pusat menjadikan daerah Jawa Timur sebagai daerah istimewa dan mengangkat Kolonel Sungkono sebagai Gubernur.

Pemberontakan dapat diatasi dan daerah-daerah yang diduduki dapat dikuasai TNI kembali, antara lain Sarangan, Waliku, Magetan, Ngombe, Parakan, Durgas, Ponorogo, Madiun, Wonogiri, Cepu, Pacitan dan Kudus. Pemimpin pemberontakan seperti Amir, Suripno, Maruto, dan kawan-kawan ditangkap dan Muso ditembak mati pada 31 Oktober 1948 di Ponorogo.⁸¹

Dalam rangka pemulihan keamanan, tentara selain melakukan fungsi hankam, juga melakukan fungsi sosial-politik. Ini dikarenakan pamong praja yang terlanda pemberontakan praktis tidak ada karena telah dibunuh oleh PKI atau terlibat dalam pemberontakan. Tentara mengambil alih posisi pamong praja, mereka harus mampu memutar roda pemerintahan dan ekonomi serta memulihkan kembali kehidupan masyarakat, disamping melanjutkan tugas keamanan.⁸²

Militer membangun kembali pemerintahan di desa-desa dan distrik-distrik, dalam hal ini TNI bertindak sebagai kekuatan penggalang rakyat melalui organisasi

⁸⁰ *Idem.*, hal. 55.

⁸¹ *Idem.*, hal. 55.

⁸² Subijono, *op. cit.*, hal. 17.

teritorial yang banyak diisi oleh tenaga korps mahasiswa, tentara pelajar dan mobilisasi pelajar. Hal ini dilakukan untuk mengatur pemerintahan agar sejalan dengan pemerintahan militer, sehingga dapat memperkuat pertahanan dan membasmi pengacau-pengacau negara yang hendak merobohkan negara yang sah.⁸³

c. Pada saat Agresi Militer Belanda II

Baru selesainya penumpasan PKI, Belanda melancarkan agresi militernya yang ke dua dengan menyerang dan menduduki ibu kota Yogyakarta, pada 19 Desember 1948 yang dikenal dengan Agresi Militer Belanda II. Perundingan Renville yang semula diharapkan dapat mendekatkan kedua pihak yang bersengketa ternyata tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Belanda tetap pada tuntutan tentang "Garis Van Mook" yang memperkecil wilayah kekuasaan Republik Indonesia (RI) dan pertahanan ad interim Negara Indonesia Serikat, sebaliknya Republik Indonesia (RI) tidak bisa menerima tuntutan tersebut. Sebagai jalan keluarnya, Republik Indonesia (RI) melalui Mohammad Hatta mencoba meminta Komisi Tiga Negara (KTN) agar Belanda mau mengadakan perundingan lagi, bahkan dengan syarat Republik Indonesia (RI) akan mengakui kedaulatan Belanda selama masa peralihan. Tetapi permintaan itu ditolak Belanda dan mereka tetap pada tuntutan tersebut. Bahkan pada 18 Desember 1948 Belanda mengumumkan bahwa mereka tidak lagi mengakui dan terikat pada Perundingan Renville.⁸⁴

Sebagai tindaklanjutnya Belanda pada 19 Desember 1948, pukul 06.00 pagi melancarkan serangan ke Yogyakarta. Dalam waktu singkat Belanda berhasil menguasai Lapangan Terbang Maguwo dan selanjutnya seluruh kota Yogyakarta.

⁸³ Djamal Marsudi, *Peristiwa Madiun*, Djakarta: Merdeka Press, 1966, hal. 40.

⁸⁴ A.B. Lopian, *dkk, op. cit.*, hal. 5.

Mereka berhasil menawan Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta beserta beberapa menteri yang kemudian diasingkan ke Pulau Bangka. Tetapi sebelum itu dalam sidang yang sempat diadakan pemerintah memberikan mandat kepada Menteri Kemakmuran Syafruddin Prawiranegara yang berada di Sumatra untuk membentuk dan memimpin Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI).⁸⁵ Presiden juga memerintahkan Sudarsono, Palar dan Maramis yang ada di New Delhi untuk membentuk pemerintahan Pelarian (*Exile Government*) untuk mengantisipasi apabila Pemerintahan Darurat di Sumatra tidak berhasil.⁸⁶

Dengan dikuasanya kota-kota serta jalan-jalan raya maka pihak Belanda merasa seolah-olah kini Republik Indonesia beserta Tentara Nasional Indonesia telah lenyap. Untuk selanjutnya mereka hanya merasa cukup dengan melakukan pembersihan-pembersihan gerombolan-gerombolan TNI yang sudah terpecah belah serta tidak berorganisasi lagi.⁸⁷ Belanda menganggap sudah tidak ada lagi rintangan untuk melaksanakan cita-cita mereka menjajah kembali Indonesia. Namun semua dugaan Belanda meleset, karena Belanda kurang menghargai keteguhan perlawanan rakyat Indonesia dan TNI.

Panglima Besar Soedirman dalam keadaan sakit berat mundur keselatan sampai di desa Kretek, dan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk melakukan perjuangan gerilya. Tepat pada penyerangan atas Yogyakarta, Panglima Tentara dan Teritorium Djawa (PTTD) Kolonel. A.H. Nasution bersama staf sedang berada di Modjoagung (Jombang, Jawa Timur). PTTD segera kembali ke Jawa Tengah tetapi

⁸⁵ Marwati Djoened Poesponegoro, dkk, *op. cit.*, hal. 161.

⁸⁶ G. Moedjanto, *op. cit.*, hal. 137 ; Sudarno, dkk, *Sejarah Pemerintahan Militer dan Peran Pamong Praja di Jawa TImur selama Perjuangan Fisik 1945-1950*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993, hal. 15.

⁸⁷ *Ibid.*, hal. 49.

hanya berhasil mencapai Prambanan. Dari Prambanan PTTD menuju ke lereng Merapi dan memilih desa Taskombang sebagai Markas Besar Komando Djawa (MBKD). Kemudian PTTD menyusun rencana dan melakukan hubungan dengan Komando Brigade 10 Letkol Soeharto dan Panglima Besar Soedirman.⁸⁸

Agar dapat segera menguasai keadaan dan menegakan kewibawaan pemerintah, MBKD mengumumkan pemerintahan militer untuk seluruh Djawa. Pembentukan pemerintahan militer itu melalui instruksi MBKD No.1, 25 Desember 1948 yang susunannya disesuaikan dengan peraturan pemerintah No.30, peraturan pemerintah No.70 dan instruksi Panglima Besar Angkatan Perang (BPAP).⁸⁹ Sejak diumumkannya instruksi MBKD No.1 di Djawa berlaku pemerintahan militer totaliter yang membawahi pemerintahan sipil yang bersifat totaliter pula. Hal ini adalah syarat mutlak untuk mempertahankan dan menyelamatkan republik yang sedang berada dalam keadaan perang.

Susunan pemerintahan militer menurut instruksi MBKD No.1 adalah sebagai berikut:⁹⁰

- a. Panglima Besar Angkatan Perang (BPAP) sebagai pimpinan tertinggi
- b. Panglima Tentara dan Teritorial Djawa (PPTD) untuk pimpinan di Jawa dan Madura.
- c. Gubernur Militer (GM) untuk Propinsi
- d. Komando Militer Daerah (KMD) untuk Karesidenan.
- e. Komandan Distrik Militer (KDM) untuk Kabupaten.
- f. Komandan Onder Distrik Militer (KODM) untuk Kecamatan.

⁸⁸ Saleh, A. Djamhari, *op. cit.*, hal. 12.

⁸⁹ *Idem.*, hal. 12.

⁹⁰ *Ibid.*, hal. 13 ; Sudarno, dkk, *op. cit.*, hal. 52.

g. Kader Desa dan Kader Dukuh.

Wilayah pemerintahan militer terdiri empat propinsi militer, disesuaikan dengan daerah operasi divisi yang meliputi divisi I membawahi propinsi Djawa Timur, divisi II membawahi Djawa Tengah bagian Utara, divisi III membawahi Djawa Tengah bagian Barat, dan divisi IV yaitu Siliwangi. Tujuan dari pemerintahan militer ini adalah:⁹¹

1. Republik harus tetap berjuang sebagai negara.
2. Pemerintahan harus berjalan terus, bagaimanapun sulitnya.
3. Pemerintahan militer semata-mata adalah alat perjuangan, berkewajiban menyusun tenaga dan mengerahkan alat-alat perjuangan guna menyelamatkan negara.

Tugas pokok tiap eselon ialah menyelenggarakan dan menghidupkan kembali seluruh aspek pemerintahan yang meliputi bidang-bidang: pemerintahan umum, ekonomi, kemasyarakatan dan pertahanan.

- a. Pemerintahan umum, yang mengurus bidang organisasi, kehakiman, ketertiban dan bidang perhubungan: rakyat harus merasa bahwa republik masih ada, keamanan dan ketertiban umum tetap dijaga.
- b. Ekonomi, menyelenggarakan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan tentara. Nilai ORI (Oeang RI) harus tetap dipelihara dan uang musuh harus disita dan dimusnahkan.
- c. Kemasyarakatan, yaitu usaha untuk mengatur kesejahteraan sosial. Perawatan kesehatan untuk rakyat harus diperhatikan, sekolah dan pendidikan harus

⁹¹ Nugroho Notosusanto (ed), *op. cit.*, hal. 55 ; Saleh, A. Djamhari, *op. cit.*, hal. 13.

dipelihara. Para pengungsi yang ingin kembali ke kota pendudukan musuh harus disumpah, agar mereka menjadi kawan di daerah musuh.

- d. Pertahanan, menyelenggarakan pertahanan dan ketahanan dalam lingkungan daerah dengan cara:
 1. Setiap lurah atau keluarga harus tahu bagaimana sikapnya kalau tertawan musuh.
 2. Tiap desa harus memiliki alat pemberitaan, alat tanda bahaya.
 3. Setiap penduduk harus tahu bagaimana menyelamatkan dirinya dan barang-barang berharga, seperti padi dan bahan makanan lain apabila ada musuh.⁹²

Pembentukan pemerintahan militer ini banyak sekali mengalami kesulitan dan rintangan. Disamping kesulitan personalia yang dapat dipecahkan dengan dikeluarkannya keputusan Kepala Staf Angkatan Perang pada 1 Februari 1949 mengenai mobilisasi pelajar. Para pelajar sekolah lanjutan yang belum tergabung dalam pasukan dimobilisasi untuk membantu menyelenggarakan pemerintahan militer dan mengisi lowongan personalianya. Mereka diangkat sebagai perwira-perwira cadangan dalam Angkatan Perang. Selain itu sering timbul salah paham dengan pejabat sipil yang kurang tahu mengenai tujuan pemerintahan militer.

Kesulitan lainnya harus dihadapi oleh MBAD adalah tidakan golongan-golongan tertentu yang berjuang untuk diri mereka sendiri. Misalnya di Jawa Barat di bawah pimpinan Kartosuwirjo mereka mendirikan Darul Islam yang membangkang terhadap republik. Puncak penyelewengan Kartosuwirjo adalah diproklamasikannya Negara Islam Indonesia (NII) dengan alasan bahwa republik telah roboh jatuh ketangan Belanda. Dibidang militer Kartosuwirjo mendirikan Tentara Islam

⁹² Nugroho Notokusanto (ed), *op. cit.*, hal. 55-56.

Indonesia (TII) dengan mengeluarkan perintah agar menghancurkan tentara republik yang berada dalam daerah kekuasaannya, karena menganggap sebagai tentara liar.⁹³ Gerakan pemberontakan Kartosuwirjo belum sempat dihancurkan, karena konsentrasi TNI ditunjukkan kepada Belanda.

Di kediri, Jawa Timur oleh golongan tertentu diproklamasikan Pemerintahan Murba Terpendam yang didukung penuh oleh batalion Sabarudin. Proklamasi ini ditindas tegas oleh Gubernur Militer Kolonel Sungkono. Selain proklamasi Angkatan Perang juga harus menghadapi provokasi-provokasi, intimidasi yang dilakukan oleh golongan tertentu yang ingin memisahkan rakyat dan TNI. Untuk mencegah timbulnya fitnah MBKD megeluarkan instruksi 5 Januari 1949, tentang non kooperasi yang ditunjukkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Semua warga negara yang bekerjasama dengan musuh adalah penghianat dan akan diadili dengan hukum militer. Kemudian disusul dengan instruksi mengenai kabar bohong, untuk meyakinkan rakyat agar rakyat tetap waspada terhadap kabar-kabar bohong yang mengacaukan suasana.⁹⁴

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa selama mengobarkan perang gerilya TNI tidak hanya melaksanakan fungsi militer yaitu pertahanan, melainkan juga melaksanakan fungsi-fungsi sosial politik, dengan menugaskan pula personil militer pada bidang-bidang non-militer.

⁹³ Saleh, A. Djamhari, *op. cit.*, hal. 14.

⁹⁴ *Idem.*, hal. 14-15.

B. Masa Demokrasi Liberal (1949-1959)

Setelah penyerahan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda Desember 1949 dan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Agustus 1950 peran militer dibatasi. Pembatasan ini dikarenakan UUDS 1950 didasarkan pada tradisi demokrasi liberal yang dengan tegas menempatkan militer di bawah supremasi sipil.

Walaupun pada masa demokrasi liberal peranan militer dibatasi, akan tetapi berbagai bentuk peranan militer dalam politik mulai terlihat kembali yakni saat diberlakukan supremasi sipil, angkatan bersenjata masih melakukan beberapa aksi yang bersifat politis. Peristiwa penting yang terjadi ketika itu adalah peristiwa 17 Oktober 1952. Peristiwa ini menunjukkan mulai berkembangnya pemikiran-pemikiran mengenai peranan tentara dibidang politik. Peristiwa 17 Oktober 1952 bisa dikatakan merupakan krisis politik besar pertama yang melibatkan tentara di dalamnya.

Sebenarnya peristiwa 17 Oktober 1952 tidak bisa dilepaskan dari masa-masa sebelumnya, sebagai akibat selesainya perang kemerdekaan dan Indonesia menghadapi berbagai persoalan, antara lain:⁹⁵

1. Keadaan politik yang labil dengan sistem demokrasi liberal model Eropa Barat (khususnya Belanda).
2. Keadaan sosial ekonomi yang semakin memburuk dan korupsi semakin meluas.
3. Persoalan pembebasan Irian Barat yang tidak cepat selesai
4. Kemerosotan integritas dan kemampuan aparatur pemerintahan, misalnya pertentangan antar dan intern partai-partai dan pergolakan intern dan ABRI.

⁹⁵ Marwati Djoened Poesponegoro, dkk, *op. cit.*, hal. 246-247.

Selain itu disebabkan juga pelaksanaan pemilu yang tertunda-tunda yang dianggap hanyalah taktik DPRS. Hal inilah yang menjadikan konflik intern militer dan partai-partai menajam, korupsi meluas, dan keadaan keamanan memburuk. Namun penyebab utama dari peristiwa ini adalah terlalu jauhnya campur tangan kaum politisi sipil terhadap masalah intern Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI). Peristiwa ini bersumber pada kericuhan yang terjadi di lingkungan Angkatan Darat. Diawali pada saat Kabinet Wilopo sedang mengalami krisis ekonomi yang terjadi akibat adanya *Korea boom* dan disusul dengan *Korea slump* yang berdampak terhadap ekonomi Indonesia.⁹⁶

Untuk mengatasi masalah tersebut, kabinet ini mengeluarkan berbagai kebijakan yang salah satunya pemensiunan pegawai negeri dan prajurit secara besar-besaran. Isu yang berkembang di kalangan perwira TNI bahwa yang akan di demobilisasi adalah mereka yang tidak mengenyam pendidikan Belanda. Rencana profesionalisasi Angkatan Perang ini menimbulkan keresahan dikalangan mereka yang merasa pendidikan teknis militernya kurang, seperti mereka yang berasal dari tentara Peta, badan-badan perjuangan dan laskar-laskar.⁹⁷ Seperti diketahui badan-badan perjuangan dan laskar-laskar ini dekat dengan partai-partai, kedekatan inilah yang nantinya mengakibatkan ikut campurnya parlemen dalam urusan militer.

Kolonel Bambang Supeno yang merupakan bekas perwira Peta berkali-kali menemui presiden tanpa sepengetahuan KSAD dan Menteri Pertahanan, dalam rangka tidak meyetujui bahwa KSAP sementara akan merangkap KSAD, berhubung KSAD akan segera ke luar negeri untuk studi yang makan waktu panjang. Tindakan

⁹⁶ Nugroho Notosusanto (ed), *op. cit.*, hal. 65.

⁹⁷ *Ibid.*, hal. 67.

yang dilakukan Bambang Supeno ini dianggap KSAD sebagai tindakan indiscipliner dan Bambang Supeno diskors dari jabatannya.

Tidak terima dengan kebijakan KSAD dan Menteri Pertahanan Kolonel Bambang Supeno kemudian mengirimkan surat pada 13 Juli 1952 yang ditunjukkan kepada pemerintah, presiden, Ikatan Perwira Republik Indonesia (IPRI), parlemen dan semua pejabat teras Angkatan Darat, intinya tentang ketidakpuasannya terhadap kebijaksanaan Kolonel A.H. Nasution selaku KSAD, dan meminta agar Kolonel A.H. Nasution diganti.⁹⁸ (lihat lampiran 2) Surat Bambang Supeno ini kemudian dibahas berulang kali oleh DPR yang menganggap bahwa Bambang Supeno yang benar. Sehingga menimbulkan ketegangan TNI-Angkatan Darat dan DPR semakin berkembang dengan diajukan tiga mosi tidak percaya DPR kepada pemerintah, yaitu:

1. Mosi Zainul Baharudin dan Ir. Sakirman (PKI) yang mendesak pemerintah agar diadakan peninjauan kembali struktur organisasi Kementrian Pertahanan dan secepat mungkin dibentuk Undang-undang Pertahanan untuk mengatur lebih lanjut kedudukan hukum setiap anggota Angkatan Perang. Mosi ini merupakan mosi tidak percaya terhadap kebijaksanaan menteri pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX.
2. Mosi I. J Kasimo (Khatolik) dan M. Natsir (Masyumi), yang mendesak agar segera diakhirinya penggunaan Misi Militer Belanda (NMM) dan dibentuknya panitia untuk mengatur susunan baru organisasi Angkatan Perang.

⁹⁸ *Idem.*, hal 67 ; A. H. Nasution, *Memenuhi Panggilan Tugas (jilid 3: Masa Pancaroba I)*, Jakarta: Gunung Agung, 1983, hal. 22.

3. Berdasarkan petunjuk ketua DPP partainya (Sidik Djojokusarto) Manai Shopiaan mengajukan mosinya yang berisi:
 - a. Mendesak kepada pemerintah agar segera mengakhiri penggunaan Misi Militer Belanda (NMM)
 - b. Mengadakan reorganisasi dan mutasi pimpinan Angkatan Perang dan Kementerian Pertahanan.
 - c. Menganggap perlu disusun Undang-undang Pokok Pertahanan.⁹⁹

Penentang lain KSAD Kolonel Nasution yang motifasinya lebih bersifat pribadi adalah Kolonel Zulkilfi Lubis, kepala Biro Informasi (Intelejen) Staf Angkatan Perang (BISAP) pada Menteri Pertahanan. Ia melancarkan serangan terhadap KSAD melalui iparnya ketua seksi pertahanan parlemen, Zainul Baharudin.¹⁰⁰ Pada 28 Juli 1952 parlemen membuka perdebatan mengenai persoalan-persoalan Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang yang dipusatkan kepada soal-soal intern TNI Angkatan Darat. Dalam perdebatan tersebut kejelekan TNI Angkatan Darat diungkap di depan umum oleh parlemen yang menimbulkan amarah dari pihak TNI.

Hal seperti itu dirasakan oleh pimpinan Angkatan Darat sebagai usaha campur tangan parlemen dalam lingkungan Angkatan Darat. Masalah intern TNI-Angkatan Darat dibebaskan dalam persidangan DPRS, mosi Manai Shopiaan dianggap telah melampaui batas kekuasaan DPR dan TNI Angkatan Darat menganggap DPRS telah melakukan intervensi politik ke dalam tubuhnya.

Dengan adanya masalah tersebut, pimpinan Angkatan Darat menemui presiden bersama tujuh panglima daerah dan delapan pejabat teras markas besar Angkatan

⁹⁹ *Ibid.*, hal. 68-69.

¹⁰⁰ Nugroho Notosusanto (ed), *op. cit.*, hal. 67-68.

Darat mendesak kepada Presiden agar membubarkan parlemen, desakan tersebut juga dilakukan oleh rakyat dengan mengadakan demonstrasi ke gedung parlemen dan istana merdeka pada 17 Oktober 1952. Demonstrasi ini direncanakan Markas Besar Angkatan Darat atas inisiatif Letnan Kolonel Sutoko dan Letnan Kolonel S. Parman. Pelaksananya diorganisasi oleh Kolonel dr. Mustopo Kepala Kedokteran Gigi Angkatan Darat dan perwira penghubung presiden Letnan Kolonel Kemal Idris, Komandan Garnisun Jakarta. Seksi Intel Divisi Siliwangi mengerahkan demonstran dari luar ibukota dengan menggunakan kendaraan truk militer. Pada waktu itu, pasukan tank muncul di Lapangan Merdeka, dan beberapa pucuk meriam diarahkan ke Istana Presiden.¹⁰¹ Presiden menolak tuntutan pembubaran parlemen dengan alasan ia tidak mau menjadi diktator, tetapi akan berusaha mempercepat pemilu.

Akibat dari peristiwa ini Kolonel A.H. Nasution mengajukan permohonan mengundurkan diri dan diikuti oleh Mayjen T.B. Simatupang, serta tujuh perwira daerah yang ikut dalam peristiwa itu, ada pula yang ditahan dan digeser kedudukannya, antara lain penahanan Panglima Teritorium V Letnan Kolonel dr. Suwondho sekaligus pengoperan Komando oleh Letnan Kolonel Sudirman, bulan berikutnya Komando Teritorium VII Panglima Gatot Subroto ditahan dan diganti oleh Kepala Staf Letnan Kolonel Warrouw, dan yang terakhir di Teritorium II Letnan Kolonel Kretarto mengoper komando dari Panglima Kosasih.¹⁰² Pada akhirnya jabatan KSAD digantikan Kolonel Bambang Sugeng.

¹⁰¹ Harold, Crouch, *op. cit.*, hal. 27.

¹⁰² A. H. Nasution, *op. cit.*, hal. 169.

Pada masa Bambang Sugeng sebagai KSAD, ia berhasil menyatukan pihak yang pro dan kontra 17 Oktober 1952 dalam pertemuan yang menghasilkan piagam Yogyakarta (lihat lampiran 3) pada Februari 1955, berisi saran-saran antara lain:

- a. Persatukan kembali Angkatan Darat dan profesionalisme.
- b. Peristiwa 17 Oktober hendaknya dianggap selesai, hal ini harus diputuskan oleh pemerintah.
- c. Para perwira sesuai keputusan markas besar tidak boleh ikut-ikutan politik, namun perlu kejelasan batas pelibatan kaum politik terhadap Angkatan Darat.
- d. Sekalipun diakui bahwa tentara di bawah kendali pemerintah, akan tetapi harus diadakan garis pemisahan antara kepentingan politik dan kepentingan tentara.¹⁰³

Kebijakan Ali Sastroamijoyo yang mengangkat Kolonel Z. Lubis pada Desember 1953 sebagai WKSAD dan Letnan Kolonel Abimanyu dan Sapari masing-masing sebagai Asisten I dan II (Deputi I dan II), tanpa konsultasi dengan KSAD Bambang Sugeng. Dengan kebijakan itu B. Sugeng minta mengundurkan diri sebagai KSAD, karena Kolonel B. Sugeng telah menggariskan kebijakan untuk tidak mengangkat perwira-perwira yang terlibat dalam aksi atau kontra aksi 17 Oktober 1952, selama peristiwa belum diselesaikan.

Dengan pengunduran diri B. Supeno pemerintah akan mengangkat KSAD baru. Otomatis WKSAD Z. Lubis bertindak sebagai Pd. KSAD pada masa kekosongan. Kemudian pimpinan AD dengan resmi mengajukan syarat-syarat yang perlu diperhatikan dalam menunjuk KSAD baru, yakni disamping syarat-syarat kecakapan dan kepemimpinan yang lazim, jangan sampai menjadi bola persaingan politik partai-partai dan dijaga kepentingan dan keutuhan TNI. Perlu diminta agar dipelihara soal

¹⁰³ Subijono, *op. cit.*, hal. 22 ; Yahya. A. Muhaimin, *op. cit.*, hal. 78.

senioritas yang memang amat penting bagi pembinaan persatuan oleh pimpinan yang berwibawa.¹⁰⁴

Kabinet mengambil tiga kolonel sebagai calon yakni Kolonel Bambang Utoyo, Kolonel Z. Lubis dan Kolonel Sudirman ketiganya bekas blok anti 17 Oktober 1952. Sikap itu dirasakan kurang bijaksana, karena pemerintah menunjukkan tidak mau menerima calon dari pihak bekas blok 17 Oktober 1952. Kemudian kabinet mengutus Menhan Iwa Kusuma Sumantri ke Palembang untuk meminta kesediaan Panglima TT II Bambang Utoyo untuk KSAD, dan ia pun menyatakan menerima jabatan itu.

Dengan semangat Piagam Yogyakarta oleh Kolonel Z. Lubis menyatakan menolak putusan pemerintah. Namun pemerintah tetap mengumumkan akan segera dilakukan pelantikan KSAD B. Utoyo dengan pangkat Mayor Jenderal oleh Presiden Sukarno di istana pada 27 Juni 1955. WKSAD memboikot upacara itu dan tidak meizinkan partisipasi KSAD, hanya dihadiri oleh satu orang tokoh AD yakni Kolonel Sungkono, ia adalah perwira menengah yang diperbantukan kepada Menham.¹⁰⁵

Keputusan itu dianggap menyimpang dari Piagam Yogyakarta yang sudah dikomunikasikan kepada pemerintah. WKSAD Z. Lubis menolak serah terima dengan KSAD baru, sehingga Z. Lubis sementara diskorsing dari jabatannya. Pemerintah menunjuk Letnan Kolonel Mursito untuk menjadi Pd. WKSAD, tapi ia menolak pengangkatan itu demi keutuhan AD. Akibat penentangan dan aksi boikot dari tentara inilah terjadi “Mosi tidak percaya” kepada pemerintah Ali Sastroamijoyo

¹⁰⁴ A. H. Nasution, *op. cit.*, hal. 280.

¹⁰⁵ *Ibid.*, hal. 281.

dan terjadi keretakan dalam kabinetnya, sehingga kabinet Ali jatuh pada 24 Juli 1955.¹⁰⁶

Setelah Kabinet Ali Sastroamijoyo jatuh dan digantikan Kabinet Burhanudin Harahap, Bambang Utoyo mau mengundurkan diri asalkan secara terhormat. Kabinet Burhanudin Harahap berhasil memilih kembali Kolonel Nasution sebagai KSAD pada 28 Oktober 1955. KSAD Nasution berusaha memperbaiki rantai komando yang lemah akibat peristiwa 17 Oktober 1952, serta reaksi terhadapnya yang dinilai merusak disiplin militer. Selain itu hubungan Nasution dengan Presiden Sukarno maupun dengan pemerintah pada umumnya terjalin dengan baik.

Peranan lebih besar bagi militer dalam politik terjadi ketika stabilitas politik dan adanya pergolakan daerah. Untuk mengatasi pergolakan politik yang terjadi di pusat maupun daerah agar tidak meluas, presiden pada 14 Maret 1957 menyatakan negara dalam keadaan bahaya (UUKB 1957).¹⁰⁷ Disusul dengan dikeluarkannya surat perintah harian presiden sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang, segera setelah itu Gabungan Kepala Staf (GKS) dan KSAD mengeluarkan perintah harian. Baik GKS maupun KSAD menyatakan bahwa dekrit presiden itu dikeluarkan untuk mengatasi keadaan yang tidak stabil di dalam negara.

Selain mengeluarkan UUKB 1957, pemerintah juga membentuk Dewan Nasional, badan ini bertugas memberikan nasehat mengenai soal-soal pokok kenegaraan dan kemasyarakatan kepada pemerintah atas permintaan pemerintah atau atas inisiatif sendiri.¹⁰⁸ Tujuan pokok Dewan Nasional ialah menampung dan mengelurkan kekuatan-kekuatan yang ada di dalam masyarakat guna

¹⁰⁶ A.B. Lopian, dkk, *op. cit.*, hal. 178.

¹⁰⁷ Yahya A. Muhaimin, *op. cit.*, hal. 110.

¹⁰⁸ Nugroho Notosusanto (ed), *op. cit.*, hal. 77.

menyempurnakan kelancaran roda pemerintahan menuju kesejahteraan negara dan masyarakat.¹⁰⁹ Dewan ini langsung dipimpin oleh presiden.

Adapun anggota Dewan Nasional, terdiri dari:¹¹⁰

1. Golongan fungsional dalam masyarakat, terdiri dari: angkatan bersenjata, buruh pegawai, alim ulama (Islam, Khatolik, Protestan, Hindu-Bali), tani, angkatan 45, cendekiawan/ sarjana, seniman, wartawan, pemuda, warga negara peranakan.
2. Orang-orang yang dapat mengemukakan persoalan-persoalan daerah.
3. Pejabat militer dan sipil yang dianggap perlu.
4. Menteri-menteri yang dianggap perlu.

Dengan berlakunya SOB yang berarti “Peraturan Negara dalam Keadaan Bahaya dan Perang” dan dimasukkannya para kepala staf angkatan dan kepala kepolisian negara ke dalam Dewan Nasional maka sesungguhnya ABRI telah memperoleh legalitas dalam fungsi sosial politiknya bersama golongan fungsional lainnya.

Setelah mendapat legalitas peran politik tentara semakin membesar ketika pada 12 Nopember 1958, Nasution menyampaikan sebuah pidato bersejarah dalam peringatan Ulang Tahun Akademi Militer Nasional di Magelang. Waktu itulah dirumuskan apa yang kemudian dikenal sebagai “*The army’s midle way*” ,(jalan tengah TNI). Dalam pidato tersebut Jenderal Nasution menyatakan bahwa:

TNI-AD tidak bisa mengikuti tingkah laku kaum militer di Amerika Latin yang memainkan peranan politik secara langsung dan tidak bukan pula suatu institusi yang pasif dalam politik sebagai mana pada militer di Eropa Barat. Tetapi tentara Indonesia akan mencari ”Jalan Tengah” diantara kedua hal yang ekstrim itu. TNI sebagai tentara tidak akan melibatkan dirinya ke dalam persoalan politik seperti kudeta, tapi tidak pula akan sekedar menjadi penonton di dalam arena politik.

¹⁰⁹ A.B. Lopian, dkk, *op. cit.*, hal. 155.

¹¹⁰ Nugroho Notosusanto (ed), *op. cit.*, hal. 77-78.

Nasution menyatakan para perwira TNI harus diberi kesempatan untuk melakukan partisipasinya di dalam pemerintahan atas dasar individual dan membiarkan keahlian non militer mereka dimanfaatkan guna perkembangan bangsa. Kemudian ditegaskannya bahwa pada tingkat pemerintahan pusat, para perwira TNI harus diperbolehkan berpartisipasi di dalam menentukan politik negara, baik ekonomi, keuangan, lapangan internasional dan lain-lain bidang. Karena itu TNI harus diberi tempat di dalam segala lembaga kenegaraan tidak saja di dalam Dewan Nasional dan kabinet sebagai mana yang telah dilaksanakan, tetapi juga di dalam Dewan Perancang Nasional, korps diplomatik, parlemen dan lain-lain badan pemerintahan.¹¹¹

Pidato Nasution ini merupakan upaya untuk memperoleh dasar pembenaran terhadap kelangsungan peranan tentara dalam fungsi-fungsi non-militer tersebut sesudah krisis keadaan darurat terlewati.

Keadaan inilah yang menjadi transisi ke masa Demokrasi Terpimpin tahun 1959. Usulan dari Nasution agar UUD 1945 diberlakukan kembali awalnya tidak mendapat dukungan mayoritas Dewan Nasional, partai-partai secara tegas menyatakan penentangan dengan berbagai alasan, diantaranya:

1. UUD 1945 akan memberikan posisi yang relatif lebih kuat dan stabil kepada eksekutif dan ini tentu mengganggu tradisi partai-partai besar yang saling bergantian menguasai pemerintahan. Berkurangnya otoritas parlemen dipandang sebagai berkurangnya kontrol partai terhadap kekuasaan.
2. UUD 1945 memberikan kemungkinan masuknya kekuatan-kekuatan selain partai untuk ikut mengambil peranan dalam pentas politik, ini tentu akan mengakhiri dominasi partai yang telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama.

¹¹¹ Yahya A. Muhaimin, *op. cit.*, hal. 110. ; A. H. Nasution, *Kekaryaan ABRI*, Jakarta: Seruling Masa, 1971, hal. 19, 103.

3. Gagasan kembali ke UUD 1945 yang dilontarkan Nasution, dikalangan banyak partai mengkhawatirkan terealisasinya ide itu, pasti hanya akan memperbesar pengaruh dan kewenangan militer.¹¹²

Usulan tersebut juga tidak ditanggapi positif oleh Presiden Sukarno pada Agustus 1958. Akhirnya atas desakan dari TNI-AD, pada 5 Juli 1959 Presiden Sukarno memberlakukan dekrit yang menyatakan salah satunya adalah pemberlakuan kembali UUD 1945, dengan demikian dimulailah masa baru Demokrasi Terpimpin. (lihat lampiran 4)

Dari sini dapat dipahami bagaimana terjadi hubungan yang sangat penting antara ABRI dengan UUD 1945. Di mana UUD 1945 lebih disukai oleh pimpinan Angkatan Darat, karean dalam UUD 1945 menyebutkan adanya semacam perwakilan kepentingan kelompok non-partai dan daerah di dalam parlemen, ini merupakan suatu kesempatan yang dapat dipakai oleh kelompok militer.

¹¹² Hendri Supriyatmo, *op. cit.*, hal. 133.

BAB IV

DAMPAK PERANAN MILITER BAGI PEMERINTAHAN

INDONESIA

Setelah mengetahui berbagai peranan militer dalam politik Indonesia pada masa perang kemerdekaan (1945-1949) dan masa demokrasi liberal (1949-1959). Adapun berbagai dampak yang terjadi dari peranan militer dalam politik di Indonesia, antara lain:

A. Dampak bagi Perkembangan Politik.

Pada periode awal kemerdekaan 1945-1949, tentara belum dinyatakan secara tegas, secara formal, kedudukan, fungsi, posisi dan peranannya dalam menjalankan dharma baktinya. Posisi tentara apakah hanya merupakan alat pemerintah yang berkuasa pada saat itu ataukah tentara merupakan alat kekuatan dari revolusi, yang berarti tentara merupakan kekuatan yang diikutsertakan dalam menentukan kebijaksanaan politik dalam melaksanakan revolusi.

Tentara dalam menjalankan tugas pada awalnya tidak pernah memikirkan karir politik yang ada hanya berjuang mempertahankan kemerdekaan. Dikarenakan juga pada masa perjuangan melawan Belanda anggota tentara diajarkan doktrin, bahwa tentara tidak boleh berpolitik, tentara hanya tunduk kepada perintah yang boleh berbicara dan mempunyai hak untuk berbicara mengenai politik atau kebijaksanaan pemerintah adalah para politisi sipil, baik perseorangan atau sebagai anggota suatu

partai politik.¹¹³ Walaupun dalam pelaksanaannya tugas perjuangan tentara masih bertugas politik, ekonomi dan lain-lain secara praktis.

Dengan adanya politik liberalisme, yang dianut oleh bangsa Indonesia dan menghendaki soal-soal militer ditempatkan di bawah politik menjadikan militer Indonesia masa itu hanya menunggu perintah pemerintahan sipil untuk menjalankan pertahanan. Padahal dalam menentukan arah perjuangan melawan Belanda antara pihak militer dengan pemerintah berbeda pandangan. Pemerintah dengan jalan diplomasi sedangkan militer dengan perjuangan senjata. Akibat kegagalan jalan diplomasi yang dilakukan pemerintah dalam Perundingan Linggarjati dan Perundingan Renville, mengakibatkan terjadinya Agresi Militer Belanda I (21 Juli 1947), yang kemudian disusul dengan Pemberontakan Madiun (18 September 1948) dan Agresi Militer Belanda II (19 Desember 1948)¹¹⁴ memaksa militer turun tangan untuk mempertahankan keamanan dan berusaha mengisi kekosongan kekuasaan pemerintahan yang diakibatkan oleh kegagalan para politisi sipil.

Kegagalan yang dilakukan oleh para politisi sipil dalam menjalankan pemerintahan menjadikan militer tidak bisa tinggal diam. Terjadinya berbagai pemberontakan daerah, seperti PRRI/ Permesta dan berlakunya SOB untuk seluruh wilayah Indonesia, menjadikan militer semakin mempunyai wewenang apa yang akan dilakukan untuk kebaikan militer. Sukarno dengan dasar keadaan darurat perang menunjuk "Warga negara Sukarno" untuk menjai formatur kabinet.¹¹⁵ Dalam penyusunan kabinet, militer dijadikan landasan utama oleh Sukarno (pemerintah),

¹¹³ M. Panggabean, *Hakekat Kekaryaan ABRI/ TNI –AD bukan Militerisme*, Jakarta: Pembimbing Masa, 1967, hal. 11.

¹¹⁴ *Ibid.*, hal. 13.

¹¹⁵ Hendri Supriyatmo, *op. cit.*, hal. 92.

bukan lagi peranan partai-partai politik dan parlemen, ini terlihat dalam ruang sidang Sukarno duduk didampingi Nasution dan sejumlah pembesar militer berhadapan dengan tujuh politisi sipil dari partai-partai politik.¹¹⁶

Selain itu Nasution ditunjuk Sukarno sebagai *co-formateur* dalam pembentukan kabinet, menyusun menteri-menteri yang hendak duduk dalam kabinet dan membuat program-program kabinet. Setelah kabinet karya terbentuk dan menyusul dikeluarkannya konsepsi presiden, dihadapan pemimpin-pemimpin organisasi sipil dan militer di istana negara Sukarno mengemukakan bahwa:

1. Sistem politik yang selama ini dipakai harus diganti dengan sistem baru yang cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu sistem demokrasi musyawarah mufakat atau demokrasi terpimpin.¹¹⁷
2. Untuk pelaksanaan sistem demokrasi terpimpin perlu dibentuk suatu kabinet gotong royong yang anggotanya terdiri dari semua partai dan organisasi berdasarkan perimbangan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Konsepsi presiden ini mengetengahkan pula perlunya pembentukan “Kabinet kaki empat” yang mengandung arti bahwa empat partai besar, tidak hanya PNI, Masyumi, NU, melainkan juga PKI, harus turut serta di dalamnya untuk menciptakan kegotong royongan nasional.
3. Pembentukan Dewan Nasional yang terdiri dari golongan fungsional dalam masyarakat. Dewan Nasional ini tugas utamanya adalah memberi nasihat kepada kabinet, baik diminta maupun tidak diminta.¹¹⁸

¹¹⁶ A. H. Nasution, *Memenuhi Panggilan Tugas. Jilid 4: Masa Pancaroba Kedua*, Jakarta: Gunung Agung, 1984, hal. 90.

¹¹⁷ Yahya A. Muhaimin, *op. cit.*, hal. 93.

¹¹⁸ Nugroho Notokusanto (ed), *op. cit.*, hal. 76.

Setelah menjadi golongan fungsional dan memperoleh landasan konstitusional dalam berpolitik peranan tentara menjadi berubah. Begeser perannya mengurus tidak hanya pertahanan tetapi juga masalah politik dan duduk dalam parlemen. Hal ini menjadikan jatah kursi politisi sipil berkurang dalam kabinet dan peranan politisi sipil sedikit banyak tergantikan oleh golongan tentara. Setelah ABRI dimasukkan ke dalam golongan fungsional atau golongan karya, dalam hal ini termasuk golongan karya pertahanan keamanan diharapkan jasa-jasanya dimasa yang akan datang untuk negara dan masyarakat lebih baik lagi dari masa perang kemerdekaan, karena sudah memiliki peranan ganda.

Dari peranan ganda yang diperoleh sudah jelas bahwa ABRI/ TNI - AD tidak semata-mata hanya sebagai alat pertahanan, tetapi juga sebagai alat revolusi dan sebagai suatu kekuatan sosial yang riil. Dalam fungsinya sebagai alat pertahanan keamanan ABRI/ TNI -AD bertugas dan berkewajiban untuk mempertahankan dan mengamankan dalam arti militer terhadap serangan, perongrongan, pengacauan dan penyelewengan baik yang datangnya dari luar maupun dari dalam. Sedangkan ABRI/ TNI sebagai golongan fungsional atau golongan karya adalah ikut secara aktif sebagai pelopor melaksanakan pembangunan masyarakat dan negara dalam segala bidang, guna mewujudkan tiga segi kerangka tujuan revolusi Indonesia.¹¹⁹ yaitu:

- a. Turut serta dalam segala kegiatan negara/ bangsa/ rakyat Indonesia dalam rangka penyelesaian revolusi.
- b. Menegakan dan mengamankan nilai-nilai kehidupan negara/ bangsa/ rakyat Indonesia.

¹¹⁹ M. Panggabean, *op. cit.*, hal. 28-29.

- c. Mengembangkan kekuatan/ ketahanan nasional serta menyelenggarakan sebagian dari pada pertahanan dan keamanan nasional.

Dengan menjadi golongan fungsional atau golongan karya dengan resmi telah ada landasan hukum yang memuat golongan fungsional atau golongan karya di dalam ketatanegaraan dan perundang-undangan negara Republik Indonesia, sebagai mana juga ditentukan dalam UUD 1945, yang peraturan-peraturan pelaksanaannya antara lain:

1. Undang-Undang Dasar 1945

Dalam bab II, pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwa MPR terdiri dari anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah –daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang yang dimaksud dengan golongan-golongan dalam pasal 2 ayat 1 UUD 1945 tersebut di atas adalah golongan fungsional atau golongan karya, seperti yang telah ditentukan oleh penetapan presiden No. 2 tahun 1959.

2. Diikutsertakannya ABRI di dalam Dewan Nasional sebagai golongan fungsional tahun 1957, ABRI dalam rangka merumuskan dan pelaksanaan Demokrasi Terpimpin mengusulkan untuk kembali ke UUD 1945.
3. Diikutsertakannya ABRI di dalam panitia negara untuk perubahan Undang-undang pemilihan umum, dimana diadakan persetujuan antara semua pihak (politik dan karya), bahwa golongan karya yang akan ambil bagian dalam pemilihan umum yang akan datang, terdiri atas empat golongan: golongan karya pembangunan materil, sepiritual, kerohaniaan, dan angkatan bersenjata (27 Mei 1958).

4. Golongan fungsional atau golongan karya telah pula mendapatkan kedudukan dan dasar hukum dalam Undang-undang pasal 80 tahun 1958 tentang Dewan Perancang Nasional. Dalam menghadapi pembentukan Dewan Perancang Nasional itu telah dikemukakan adanya tujuh pokok golongan atau angkatan fungsional (karya) diantaranya ABRI dimasukan dalam salah satu pokok golongan bersenjata yang terdiri dari AD, AL,AU, Polisi, Veteran, OPR dan OKD.
5. Di dalam amanat presiden 22 April 1959 kepada konstituante dijelaskan peranan ABRI sebagai golongan karya untuk mengambil bagian dalam menentukan haluan negara dan dalam menciptakan masyarakat adil dan makmur.
6. Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 maka ABRI diakui dan di sahkan sebagai salah satu golongan karya angkatan bersenjata yang diikutsertakan secara aktif dalam segenap kehidupan politik kenegaraan. Sehingga dengan demikian ABRI mempunyai tugas politik sebagai alat keamanan atau pertahanan keamanan, sebagai golongan karya angkatan bersenjata yang ikut serta dalam segenap kehidupan politik kenegaraan, ikut serta menentukan haluan negara.
7. Amanat tertulis presiden, perihal tata tertib DPR-GR kepada DPR-GR pada 17 Juli 1960 No. 2292/ HK/ 60 yang menyatakan sebagai berikut “Golongan-golongan karya merupakan satu golongan karya dalam DPR-GR yang bila mana perlu dapat dibagi dalam sub golongan-sub golongan angkatan bersenjata, pembangunan spiritual, dan pembangunan materil”
8. Amanat negara pada pembukaan sidang DPR-GR 16 Agustus 1960 yang menyatakan sebagai berikut “Saudara-saudara semuanya masuk dalam MPRS saja

tambah dengan wakil-wakil dari daerah sesuai dengan UUD 1945 ditambah dengan wakil-wakil golongan karya sesuai dengan UUD 1945.

9. Ketetapan MPRS No. II/ MPRS/1960, yaitu:

a. A/ III/ 402/ 51, yang berbunyi sebagai berikut “Angkatan Perang Republik Indonesia dan polisi negara diikutsertakan dalam proses produksi dengan tidak mengurangi tugas utamanya masing-masing”

b. A/ III/ 404/ Sub/ C, yang berbunyi sebagai berikut “Golongan-golongan di dalam masyarakat kita berkewajiban untuk berusaha atau turut berikhtiar untuk mencapai tujuan nasional kita itu. Angkatan bersenjata adalah golongan karya sebagai golongan karya angkatan bersenjata yang bersangkutan turut memikul tanggung jawab terhadap lembaga dimana mereka duduk atau menjadi anggota. Dalam kedudukan itu mereka menjalankan tugasnya dalam rangka tanggung jawab lembaga tersebut. Angkatan bersenjata kita terdiri atas Angkatan Perang Republik Indonesia dan polisi negara.

c. A/ III/ 69/ 415, yang berbunyi sebagai berikut “Peranan dan kegiatan Angkatan Perang dan kepolisian negara dibidang produksi mendekatkannya dengan rakyat secara lebih intensif, dalam proses pembangunan negara terutama dalam hal industrialisasi dan pelaksanaan Lenderform”

10. Perintah harian presiden/ panglima tertinggi pada hari Angkatan Perang tahun 1961 yang menyatakan sebagai berikut ”Ikutsertanya Angkatan Perang dalam segala bidang kegiatan pembangunan dan penertiban masyarakat dan negara belumlah pernah seluas seperti sekarang ini”

11. Peranan ABRI sebagai alat revolusi dan alat negara telah ditegaskan lagi dalam ketetapan MPRS No. XXIV/ MPRS/1966 yang menyatakan bahwa kedudukan ABRI adalah sebagai alat revolusi dan alat negara yang dalam pelaksanaan tugasnya mempergunakan sistem persenjataan fisik atau teknologis dan sistem persenjataan sosial atau politik.¹²⁰

Berdasarkan dasar-dasar hukum tersebut ABRI/ TNI AD peranannya dalam urusan sosial politik semakin diakui tidak hanya sebagai kekuatan pertahanan saja.

B. Dampak Bagi Perkembangan Militer

Sejak awal kemerdekaan tentara Indonesia telah membangun persepsi dan pencitraan diri bahwa tentara adalah lembaga yang melahirkan dirinya sendiri dan merumuskan dirinya sendiri. Hal inilah yang kemudian menjadi bibit *pretorianisme* di mana militer menjadi otonom atas sikap dan tindakannya. Citra-diri ini diperkuat dengan kemampuan mereka untuk membiayai dirinya sendiri ketika pemerintah memang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tentara. Hal ini terwujud sepanjang pengalaman tentara bergerilya bersama rakyat. Dengan demikian, sejak lahirnya TNI sudah memiliki elemen embrionik sebagai pelaku ekonomi politik baik pada tataran tata-pikir maupun rumusan tafsir atas ideologi yang kemudian dibangunnya.

Sejak masa Revolusi 1945 tentara Indonesia tidak pernah membatasi dirinya sebagai kekuatan politik, sebab klaim keterlibatan mereka dalam perjuangan kemerdekaan mengandaikan keterlibatan perjuangan politik dan militer. Para pemuda

¹²⁰ *Ibid.*, hal. 30-32.

yang berjuang mengangkat senjata tidak memikirkan karir yang serius dibidang militer, namun lebih didorong semangat patriotik akibat pengaruh proklamasi kemerdekaan oleh politisi dan kalangan nasionalis. Ditambah dengan minimnya bekal latihan kemiliteran dan persenjataan modern, perlawanan dilakukan melalui perang gerilya, sehingga perbedaan kehidupan sipil dan militer menjadi tidak jelas.¹²¹ Ketiadaan tradisi apolitis dikalangan militer semakin memuluskan peran-peran politik para pemimpin militer serta tiadanya kesempatan menumbuhkan secara bertahap “*Profesionalisme militer*”. Sehingga keterlibatan militer dalam politik terus berkemabang sampai kebidang ekonomi.

Keterlibatan militer Indonesia dalam bidang ekonomi, terutama dalam hal ini bisnis dimulai sejak awal kemerdekaan, salah satu alasan utamanya adalah untuk mendapatkan dana tambahan bagi militer. Sejak 1945-1949 aktivitas bisnis militer dilakukan dalam konteks perjuangan meraih kemerdekaan, di mana mereka mencari uang ditunjukkan untuk mendanai operasi militer. Angkatan Darat tidak hanya merasa terdesak oleh kebutuhan akan peralatan yang baru, persenjataan dan fasilitas-fasilitas lainnya tetapi juga kebutuhan untuk hidup dengan wajar baik bagi prajurit maupun para perwira.¹²² Awal kemerdekaan setiap unit perlawanan Indonesia harus menemukan sumber pendapatan sendiri untuk membiayai operasi militer melawan Belanda.

Tidak hanya bisnis legal yang dijalankan, bisnis yang ilegal pun dijadikan andalan untuk dana oprasional, guna mempertahankan kemerdekaan yang masih seumur jagung. Misalnya di daerah-daerah yang menghasilkan barang-barang ekspor

¹²¹ Harold, Crouch, *op. cit.*, hal. 22.

¹²² *Ibid.*, hal. 37.

seperti Sumatra dan Sulawesi Utara, tentara dapat memperoleh dana dengan penyelundupan setengah resmi.¹²³ Sementara di tempat-tempat lain para panglima melakukan usaha-usaha dagang yang tidak biasa dengan perusahaan-perusahaan daerah yang pada umumnya milik orang-orang Cina.

Keterlibatan ekonomi kalangan tentara yang terbatas dalam sektor-sektor ekonomi tertentu, tiba-tiba diperluas setelah berlakunya keadaan darurat perang 1957. Undang-undang tersebut menempatkan tentara kesuatu posisi di mana mereka memiliki kekuasaan besar khususnya di luar Jawa yang biasanya pengawasan sipil lemah. Meskipun para panglima daerah tidak selalu menggunakan kekuasaan darurat mereka secara penuh, tetapi mereka sering mendapat keuntungan dari kepentingan langsung dalam pengelolaan administrasi ekonomi seperti pengumpulan pajak, pengeluaran izin usaha dan pemberian-pemberian fasilitas yang lain.¹²⁴

Keterlibatan militer ini semakin meningkat setelah kekalahan Indonesia dalam masalah Irian Barat di PBB. Pemerintah menasionalisasikan perusahaan-perusahaan milik Belanda. Perusahaan-perusahaan tersebut kebanyakan pabrik gula, transportasi, kehutanan, perkapalan, perbankan, dan perhotelan. Saat itu Nasution mengambil prakarsa supaya perusahaan-perusahaan itu ditempatkan di bawah militer. Diikuti dengan penempatan pejabat-pejabat militer diposisi strategis dalam perusahaan tersebut.

Selain itu ditingkat regional kesatuan-kesatuan militer secara terpisah mendirikan kongsi-kongsi dagang sendiri, biasanya bekerjasama dengan rekanan Cina. Kesempatan ini telah memperluas skala keterlibatan bisnis militer semakin

¹²³ *Idem.*, hal. 37.

¹²⁴ *Idem.*, hal. 37.

berkembang. Sehingga di bawah Undang-Undang (UU) Darurat Perang, tentara tidak hanya berhasil meningkatkan perannya di bidang politik tetapi juga ekonomi.

Semakin berkembangnya tentara dalam ekonomi sebagian merupakan aspek lain dari pelaksanaan konsep “Jalan Tengah” yang dikemukakan Jenderal A.H. Nasution tahun 1958. Para perwira memainkan peranan diseluruh sektor sipil tetapi tidak dalam rangka mendapatkan kedudukan eksklusif untuk mendominasi. Tujuan terpenting tentara dalam ekonomi yaitu memanfaatkan perusahaan-perusahaan negara baru dalam jumlah yang banyak itu seperti kongsi –kongsi dagang yang telah dipunyai sebagai sumber dana tentara. Para perwira yang ikut serta dalam pengelolaan ekonomi dipercayai melaksanakan tugas sebagai saluran dana dan mengalihkan dana tersebut secara langsung kepada pihak tentara dari pada ke pemerintah, sehingga mengurangi ketergantungan tentara pada anggaran belanja pemerintah pusat. Kongsi-kongsi dagang yang pernah sangat menguntungkan Belanda dulu kemudian menjadi sumber-sumber pendapatan di bawah kontrol tentara

Peranan baru bagi tentara di bidang ekonomi, tidak saja memberikan suatu pertaruhan besar dalam pengertian ekonomi kepada tentara sebagai suatu institusi, tetapi juga menempatkan banyak perwira secara perseorangan ke dalam suatu lingkungan di mana mereka dapat mengembangkan kebutuhan-kebutuhan material mereka sendiri.

Keterlibatan begitu banyak perwira dalam soal-soal ekonomi membawa perubahan etos yang besar dikalangan tentara. Sebelum tahun 1957 kebanyakan perwira sangat mengutamakan fungsi tentara sebagai suatu kekuatan pertahanan, dalam perkembangannya banyak perwira yang tertarik kepada soal-soal keuangan, baik

dari perusahaan-perusahaan negara, administrasi sipil maupun perusahaan-perusahaan kesatuan setempat, menumbuhkan suatu persepsi baru mengenai fungsi –fungsi tentara.

Perluasan yang cepat peranan tentara dibidang ekonomi setelah tahun 1957 disertai pula oleh peningkatan sebagai kekuatan politik. Perwira-perwira Angkatan Darat memasuki elit politik dan ekonomi menjadikan mereka makin terbiasa dengan hak-hak istimewa serta kehidupan makmur yang diperoleh dari setatus tersebut. Sebagai kekuatan politik Angkatan Darat semakin berkepentingan mempertahankan kepentingan itu dan sebagai organisasi politik secara wajar mencari kedudukan bagi para anggotanya pada tempat-tempat yang berpengaruh seperti kedudukan dalam kabinet, golongan atas kepegawean negeri dan administrasi wilayah, mereka dapat menjaga dan mengamankan posisi mereka. Dalam kedudukan sebagai kehidupan elit dan sebagai pengambil manfaat dari orde sosial yang ada, para perwira hanya sedikit yang menaruh perhatian pada usaha untuk mengubah keadaan pada umumnya dan kepentingan mereka didukung oleh sistem yang berlaku.¹²⁵

Dapat disimpulkan bisnis di lingkungan militer yang pada awalnya hanya untuk memenuhi kebutuhan logistik dan operasional tentara yang tidak terdukung secara layak oleh pemerintah. Perkembangannya keterlibatan militer dalam bisnis semakin meluas tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan oprasional militer tetapi juga untuk pemasukan pribadi. Dengan langkah –langkah TNI yang demikian, maka TNI berkembang dengan pesat baik dalam bidang militer, politik maupun ekonomi.

¹²⁵ *Ibid.*, hal. 40.

Peranan politik militer ini terus berkembang sampai pada masa Orde Baru dengan konsep Dwifungsi ABRI yang diprakarsai oleh Nasution.



BAB V

KESIMPULAN

Perang dunia berakhir dengan menyerahnya Jerman kepada Sekutu di Eropa, serta menyerahnya Jepang kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945 menjadikan Indonesia mengalami *Vacum of Power*. Setelah Jepang kalah kemudian Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Untuk menunjang berdirinya negara dalam hal pertahanan, pemerintah membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR). Melihat gejala-gejala kedatangan Belanda kembali ke Indonesia, maka untuk menghadapinya BKR diubah namanya menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dengan Oerip Sumoharjo sebagai kepala stafnya dan Jenderal Soedirman sebagai pimpinan tertinggi TKR. Selanjutnya TKR pada 26 Januari 1946 diubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI), dan kemudian diubah lagi menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada 3 Juni 1947. Segenap badan-badan kelaskaran dimasukkan serentak dalam wadah yang dinamakan TNI.

Kedatangan pasukan Sekutu ke Indonesia untuk melucuti senjata tentara Jepang dan mengembalikan ke negara asalnya ternyata diboncengi tentara Belanda yang menyamar sebagai anggota tentara Sekutu, hal ini menimbulkan kemarahan rakyat Indonesia dan menimbulkan insiden –insiden di berbagai daerah seperti yang terjadi di Surabaya, Ambarawa dan Bandung. Semua ini dilakukan untuk menghalangi Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia.

Di lain pihak pemerintah juga melakukan berbagai perundingan untuk menyelesaikan permasalahan dengan Belanda. Pada masa Kabinet Syahrir pemerintah mengadakan Perundingan Linggarjati pada 15 November 1945 dan mendapatkan kedaulatan secara *de facto* oleh berbagai negara. Masa Kabinet Amir Syarifudin pemerintah juga mengadakan perundingan diplomasi dengan Belanda yaitu Perundingan Renville, dan masa Kabinet Hatta adanya Konferensi Meja Bundar (KMB) yang mana Indonesia mendapatkan pengakuan kedaulatan oleh Belanda secara *de facto* dan *de jure* pada 27 Desember 1949.

Sebelum mendapatkan pengakuan kedaulatan, perundingan yang dilakukan pemerintah ini menimbulkan berbagai permasalahan. Peningkaran Perundingan Linggarjati dan Perundingan Renville yang dilakukan oleh Belanda menimbulkan Agresi Militer Belanda I dan Agresi Militer Belanda II. Selain itu keadaan dalam negeri juga mengalami berbagai pemberontakan seperti terjadinya oposisi yang dilakukan oleh Persatuan Perjuangan terhadap Kabinet Syahrir dan pemberontakan PKI Madiun. Karena jalan diplomasi mengalami kegagalan dalam mengatasi masalah ini tentara menggunakan perjuangan senjata berusaha menyelesaikannya.

Peranan tentara selain pertahanan negara juga berperan dalam keamanan. Peranan ganda ini dilatar belakangi keadaan Indonesia yang masih menghadapi agresi Belanda dan pemberontakan diberbagai daerah. Peranan tentara dalam politik pertama pada masa Kabinet Syahrir, ada beberapa oknum tentara yang terlibat dalam gerakan Persatuan Perjuangan disusul penculikan terhadap Syahrir militer berusaha

menindak Persatuan Perjuangan dan anggota-anggota militer yang terlibat diberhentikan dari jabatannya.

Peranan kedua militer pada saat pemberontakan PKI Madiun pada 18 September 1948. PKI yang dipimpin Muso melakukan pengacauan, pembunuhan dan penculikan di daerah Solo dengan puncaknya melakukan perebutan kekuasaan di Madiun. Pemerintah melakukan tindakan militer yang sangat tegas dengan mengangkat Kolonel Gatot Subroto sebagai Gubernur Militer Jawa Tengah, Kolonel Sungkono sebagai Gubernur Militer Jawa Timur dan Kolonel A.H. Nasution sebagai Komandan Operasi Penumpasan. Tindakan ini dilakukan untuk merebut kembali daerah-daerah yang dikuasai pemberontak.

Peranan militer yang lain pada saat Agresi Militer Belanda II, saat pimpinan negara yaitu Presiden Sukarno, Hatta dan beberapa pejabat menteri ditawan Belanda militer melakukan pertahanan dan kemanan. Di bawah Jenderal Sudirman melakukan perang gerilya bersama rakyat dan di bawah Jenderal Nasution membentuk pemerintahan militer di Jawa. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan Indonesia yang ingin diduduki kembali oleh Belanda dan membuktikan bahwa republik beserta militernya masih ada untuk melindungi negara.

Setelah Indonesia kembali menjadi NKRI dan menggunakan sistem demokrasi liberal peran militer dibatasi, namun keterlibatannya dalam politik terlihat kembali saat peristiwa 17 Oktober 1952 menuntut pembubaran parlemen. Peristiwa ini berawal dari surat Kolonel Bambang Supeno terhadap presiden, parlemen dan pejabat teras Angkatan Darat. Dalam surat tersebut B.Supeno menyatakan ketidakpuasannya

terhadap kebijakan Nasution sebagai KSAD dan menuntut Nasution diganti. Tindakan B. Supeno menurut militer merupakan tindakan indisipliner, namun parlemen membenarkan tindakan B. Supeno dan membahas isi surat tersebut terus-menerus di parlemen. Bagi militer tindakan parlemen sudah terlalu jauh mencampuri urusan intern militer sehingga menimbulkan kemarahan dipihak militer dan puncaknya peristiwa 17 Oktober 1952.

Setelah penyelesaian masalah 17 Oktober 1952 berakhir dan Nasution menjabat kembali sebagai KSAD peranan militer dalam politik semakin meluas apalagi setelah militer masuk dalam Dewan Nasional dan menjadi golongan fungsional. Serta adanya konsep jalan tengah yang dikemukakan Nasution yakni para perwira Angkatan Darat aktif berperan serta dalam urusan pemerintah, namun tidak berusaha merebut posisi dominan dalam pemerintahan. Pernyataan ini pelaksanaannya kemudian didukung dengan adanya SOB yang berarti “Peraturan Negara dalam Keadaan Bahaya dan Perang”. Dengan adanya SOB militer diberi peluang untuk melakukan tindakan-tindakan non militer.

Dengan menjadi golongan fungsional militer di bawah Nasution mengusulkan berlakunya kembali UUD 1945, bagi Angkatan Darat UUD 1945 sangat penting karena di dalam UUD 1945 menyebutkan adanya semacam perwakilan kepentingan kelompok non-partai dan daerah di dalam parlemen, ini merupakan suatu kesempatan yang dapat dipakai oleh kelompok militer untuk mendapat legalitas dalam politik.

Dampak peranan militer dalam politik menjadikan perkembangan politik mengalami perubahan yang awalnya parlemen didominasi kalangan partai politik

untuk menentukan haluan negara setelah militer terlibat peranan partai sedikit berkurang. Militer dijadikan landasan utama oleh Sukarno (pemerintah) dalam penyusunan kabinet dan militer juga ambil bagian dalam pemilihan umum yang akan datang sebagai golongan angkatan bersenjata. Dalam amanat presiden 22 April 1959 kepada konstituante dijelaskan ABRI sebagai golongan karya mengambil bagian dalam menentukan haluan negara. Serta peranan militer dalam politik diakui oleh UUD 1945.

Dampak bagi perkembangan militer, militer Indonesia tidak lagi hanya sebagai pertahanan akan tetapi berkembang kearah politik dan ekonomi. Berawal dari kurangnya dana operasional yang diberikan pemerintah, menjadikan militer terlibat menjadi pelaku ekonomi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Setelah terlibat dalam ekonomi terlihat perbedaan militer, sebelum tahun 1957 kebanyakan perwira sangat mengutamakan fungsi tentara sebagai suatu kekuatan pertahanan, dalam perkembangannya banyak perwira yang tertarik kepada soal-soal keuangan, baik dari perusahaan-perusahaan negara, administrasi sipil maupun perusahaan-perusahaan kesatuan setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Haris Nasution. (1963). *Tentara Nasional Indonesia I*. Bandung : Ganaco.
- (1963). *TNI I (cetakan ke-2)*. Djakarta: Ganaco
- (1971). *Kekarjaan ABRI*. Jakarta: Seruling Masa.
- (1983). *Memenuhi Panggilan Tugas (jilid 3: Masa Pancaroba I)*. Jakarta: Gunung Agung.
- (1994). *Memenuhi Panggilan Tugas (jilid 2B: TNI berposisi anti gerilya)*. Jakarta: Haji Masabung.
- (1977). *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid III: Diplomasi Sambil Bertempur*, Bandung: Disejarah- AD dan Angkasa.
- (1984). *Memenuhi Panggilan Tugas. Jilid 4: Masa Pancaroba Kedua*, Jakarta: Gunung Agung.
- Aboe, Bakar Loebis. (1992). *Kilas Balik Revolusi (Kenangan, Pelaku dan Saksi)*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Adam, Malik. (1978). *Mengabdikan Republik Jilid II: Angkatan 45*, Jakarta: Gunung Agung.
- Arsen, Nasution. (2003). *Regiositas TNI (Refleksi Pemikiran dan Kepribadian Jenderal Besar Sudirman)*. Jakarta: Prenada Media.
- Budi, Susanto. dkk. (1995). *ABRI Siasat Kebudayaan 1945-1995*. Yogyakarta: Kanisius.
- Crouch, Harold. (1986). *Militer dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Djamal, Marsudi. (1966). *Peristiwa Madiun*. Djakarta: Merdeka Press.
- Gattschalk, Louis. (1969). *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press.
- Hendri, Supriyatmo. (1994). *Nasution, Dwifungsi ABRI dan Kontribusi kearah Reformasi Politik*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Iwa, Kusuma Sumantri. *Sedjarah Revolusi Indonesia, Jilid II: Masa Revolusi Bersendjata*, tanpa tahun dan penerbit.
- Koentjaraningrat. (1993). *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakart: Gramedia Pustaka Utama.
- Kuntowijoyo. (1995). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Lapian.A.B, dkk. (1996). *Terminologi Sejarah 1945-1950 & 1950-1959*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Mani, P.R.S. (1983). *Jejak Revolusi 1945 (Sebuah Kesaksian Sejarah)*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Marwati, Djoened Poesponegoro, dkk. (1984). *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Miriam, Budiardjo. (1982). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Moedjanto, G. (1988). *Indonesia Abad ke-20 jilid 1 (Dari Kebangkitan Nasional sampai Linggarjati)*. Yogyakarta: Kanisius.
- (1975). *Sejarah Indonesia II*. Yogyakarta: Yayasan Kanisius.
- Moh, Natsir. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muhammad, Rusli Karim. (1989). *Peran ABRI dalam Politik*. Jakarta: Haji Masabung.
- Nugroho, Notosusanto.(ed). (1984). *Pejuang dan Prajurit, Konsepsi dan Implementasi Dwifungsi ABRI*. Jakarta: Sinar Harapan.

- Nurul, Zuriyah. (2006). *Metodologi Sosial dan Pendidikan Teori- Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Panggabean, M. (1967). *Hakekat Kekaryaannya ABRI/ TNI –AD bukan Militerisme*. Jakarta: Pembimbing Masa.
- Poerwadarminta. W.J.S. (1976). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ramelan, Surbakti. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Saleh, A. Djahhari. (1967). *Markas Besar Komando Djawa (1948-1949)*, Djakarta: Lembaga Sejarah Hankam,
- Sartono, Kartodirjo. (1989). *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia suatu Alternatif*. Jakarta: Gramedia.
- (1992). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sartono, Kartodirjo. (peny). (1984). *Kepemimpinan dalam Dimensi Sosial*. Jakarta: LP3IS.
- Save, M. Dangun. (1997). *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: LPKN.
- Singh, Bilveer. (1995). *Dwifungsi ABRI: Asal-usul, aktualisasi dan implikasinya sebagai stabilitas dan pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Simatupang, T.B. (1956). *Soal- soal Politik Militer di Indonesia*. Jakarta: Gaya Raya Limited.
- (1960). *Pemerintah, Masyarakat, Angkatan Perang*. Jakarta: Indira.
- Soemitro, Djojohadikoesoemo. (1947). *Beberapa soal keoeangan*. Djakarta.
- Soerjono, Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarno,dkk. (1993). *Sejarah Pemerintahan Militer dan Peran Pamong praja di Jawa Timur selama Perjuangan Fisik 1945-1950*. Jakarta: Balai Pustaka
- Sugiona, dkk. (1985). *Kamus Ilmu Politik*. Jakarta: Depdikbud.
- Sundhaussen, ULF. (1986). *Politik Militer Indonesia 1945-1967*. Jakarta: LP3ES.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1988). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Puataka.
- Yahya, A. Muhaimin. (1982). *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966*. Yogyakarta: Gajah Mada University Perss.
- Zara, M.Yuanda. (2009). *Peristiwa 3 Juli 1946 (Menguak Kudeta Pertama dalam Sejarah Indonesia)*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Lampiran 1

SURAT JENDERAL SUDIRMAN KEPADA PRESIDEN SUKARNO YANG TIDAK JADI DI KIRIMKAN.

“Telah lebih kurang empat tahun lamanya saya mengikuti jejak langkah Paduka Yang Mulia berjuang dilapangan ketentaraan untuk menegakkan dan menyelamatkan negara RI. Bersama-sama almarhum Letnan Jenderal Urip Sumoharjo serta beberapa teman lainnya, saya membangun dan menyusun tentara kebangsaan yang dimulai dengan nama Badan Keamanan Rakyat (BKR), guna memelihara dan mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945 yang menjadi pokok pegangan dan pedoman kita semua untuk selama-lamanya.

Macam-macam kesulitan dan ujian saya hadapi dalam menyusun tentara kebangsaan kita, tetapi RI dapat tetap berdiri dengan tegaknya. Dapat dikatakan bahwa satu-satunya hak milik Nasional Republik yang masih tetap utuh tidak berubah-ubah, meskipun harus menghadapi segala macam soal dan perubahan adalah hanya APRI (Tentara Nasional Indonesia). Maka sebenarnya menjadi satu kewajiban bagi kita sekalian yang senantiasa hendak tetap mempertahankan tegaknya proklamasi 17 Agustus 1945 untuk tetap memelihara agar supaya satu-satunya hak milik nasional republik yang masih utuh itu tidak dapat diubah-ubah oleh keadaan yang bagaimana pun juga. Jika para pemimpin kita tetap teguh dan konsekuen dalam pendiriannya semula, maka Insya Allah Angkatan Perang Kebangsaan kita akan berdiri tegak selama-lamanya dengan mampu dan sanggup menjamin keamanan dan keselamatan Nusa dan Bangsa kita.

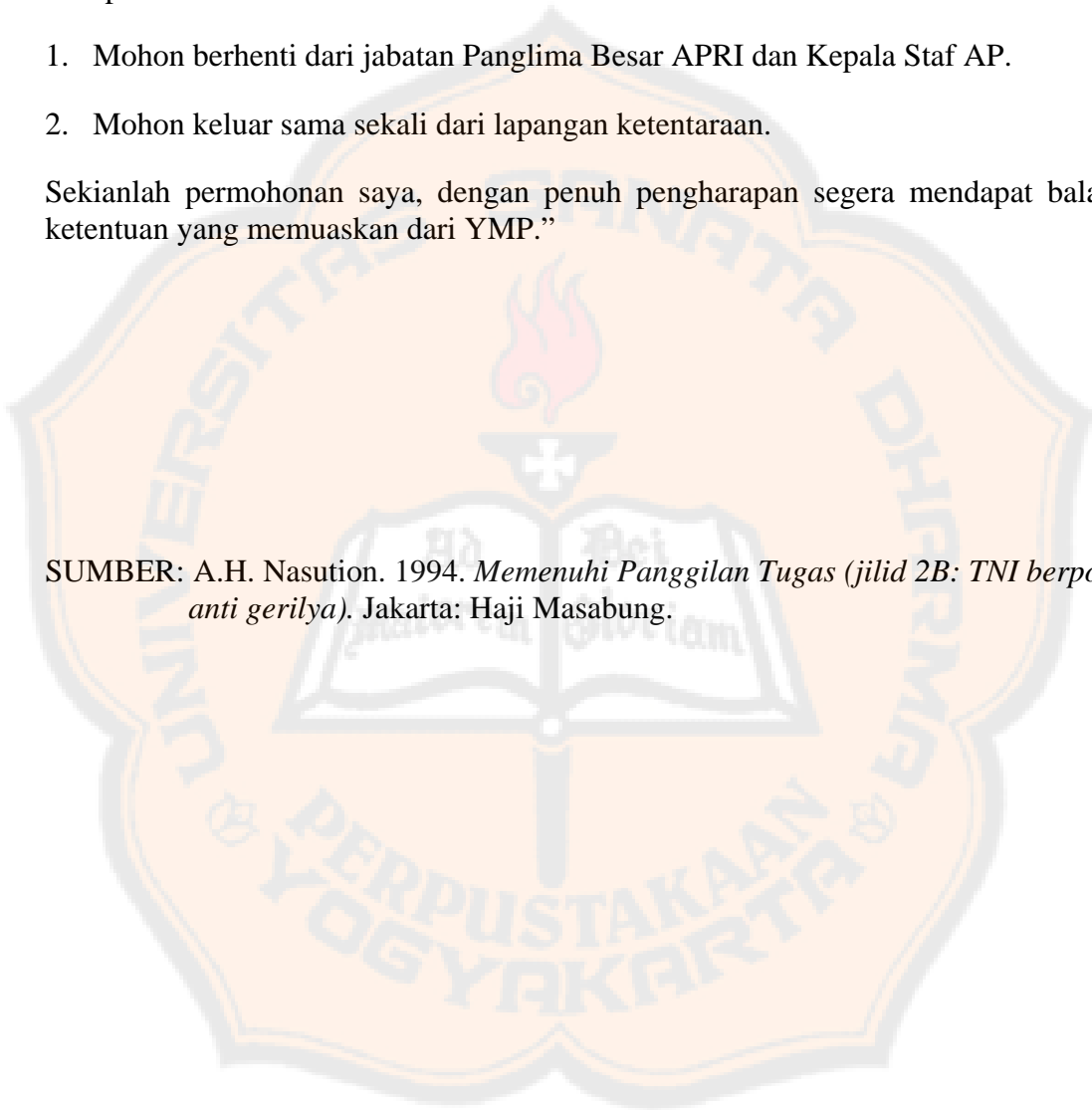
Tetapi dunia berputar, sejarah berjalan terus, kadang-kadang pikiran manusia dapat berubah pula dari haluan semula. Terbayang dimuka saya, akan beralihnya (pindahannya) jalan yang ditempuh oleh pemimpin kita. Hal semacam ini sungguh diperhatikan dan dirasakan oleh orang-orang yang senantiasa yang memperhatikan segala sesuatu dalam perjuangan kita ini dengan teliti. Kesemuanya itu menyebabkan tambahnya penderitaan lahir dan batin bagi yang bersangkutan. Meninggalnya beberapa teman opsir tinggi, diantaranya almarhum Letnan Jenderal Urip Sumoharjo dan Kolonel S. Tjokronegoro adalah disebabkan karena penderitaan jiwa. Dalam AP lazim dikatakan bahwa meninggalnya beberapa opsir tinggi itu karena *geestelijke* hara-kiri (harakiri jiwa). Tentang penderitaan saya, sehingga menyebabkan terganggunya kesehatan saya, PYM sendiri tentu maklum yang menjadi pokok sebabnya.

Karena manusia itu diwajibkan oleh Tuhan menjalankan ikhtiar, maka untuk menyembuhkan penderitaan jiwa, saya berkehendak akan berikhtiar menempatkan tenaga, pikiran dan jiwa saya di tempat yang sesuai dan semestinya. Berhubung dengan semua hal yang saya uraikan, maka saya mengajukan permohonan ke hadapan PYM.

1. Mohon berhenti dari jabatan Panglima Besar APRI dan Kepala Staf AP.
2. Mohon keluar sama sekali dari lapangan ketentaraan.

Sekianlah permohonan saya, dengan penuh pengharapan segera mendapat balasan ketentuan yang memuaskan dari YMP.”

SUMBER: A.H. Nasution. 1994. *Memenuhi Panggilan Tugas (jilid 2B: TNI berposisi anti gerilya)*. Jakarta: Haji Masabung.



Lampiran 2

SURAT KOLONEL BAMBANG SUPENO TANGGAL 13 JULI 1952 YANG
DITUJUKAN KEPADA PEMERINTAH, PRESIDEN, IPRI, PARLEMEN DAN
SEMUA PEJABAT TERAS ANGKATAN DARAT

- I. Berhubung dengan pertemuan diantara Kepala Staf Angkatan Perang, pejabat-pejabat Staf Umum Angkatan Darat dan para Panglima, (Kepala Staf Angkatan Darat, Kolonel Nasution dan Panglima Tentara Teritorium V, Kolonel Bambang Sugeng tidak hadir), di mana kami diundang untuk juga berhadir pada hari sabtu tanggal 12 bulan ini jam 11.00 pagi di rumah kediaman Kepala Staf Angkatan Perang, kami mohon dengan sangat perhatian pemerintah atas hal-hal yang tersebut di bawah ini.
- II. Di luar dugaan kami, maka kesan yang kami dapat tentang sifat pertemuan tersebut di atas, ialah untuk meminta pertanggung jawaban tentang tindakan-tindakan kami di dalam mengadakan hubungan langsung dengan Presiden/ Panglima Tertinggi. Perlakuan terhadap diri kami sebagai seorang anggota "Ikatan Perwira" oleh suatu kumpulan perwira-perwira yang mengadakan pertemuan tersebut di atas dengan memakai nama Corps Perwira, telah kami gugat dengan surat kami kepada "Pengurus Besar" Ikatan Perwira" tanggal 13 Juli 1952.
- III. Pokok persoalan yang menyebabkan kami terpaksa mengadakan hubungan langsung dengan Presiden/ Panglima Tertinggi, ialah telah kami tidak menaruh kepercayaan lagi kepada Pimpinan Angkatan Perang, khususnya Angkatan Darat, mengenai kebijaksanaan Pimpinan Angkatan Darat dalam rangka Pertahanan Negara.
Soal ini dalam pertemuan tersebut di atas kami jelaskan kepada perwira-perwira yang hadir pada waktu itu kami tegaskan sebagai berikut:
 1. Tentang Kebijakan Umum
 - a Dalam pimpinan pusat tidak tampak dengan nyata adanya suatu usaha yang tegas untuk menghidupkan persatuan jiwa (Corps- geest) di kalangan anggota tentara.
Soal ini ternyata bahwa pimpinan pusat kurang menaruh perhatian dan kurang memberikan tunjangan kepada "Ikatan Perwira" yang pada waktu ini merupakan suatu faktor yang penting untuk mengadakan persatuan jiwa di kalangan anggota-anggotanya.
 - b Adanya perintah-perintah yang tidak ditaati oleh bawahan, adanya keputusan-keputusan yang tidak dijalankan, atau kalau dijalankan tidak konsuken pelaksanaannya, adanya keputusan mengenai kebijaksanaan personil yang ganjil, tidaktegasnya pimpinan mewujudkan arah organisasi yang dituju, semuanya itu mengakibatkan tidak adanya kepercayaan lagi terhadap kepala Pemimpin Pusat.

- c Ternyata bahwa pimpinan pusat sekarang kurang memperhatikan usaha untuk mengembalikan kecintaan rakyat kepada tentaranya, sebagaimana halnya dulu pada waktu perang gerilya.
 2. Kebijakan Personal
 - a Ternyata bahwa dasar untuk menentukan kebijakan personal dari pimpinan pusat sekarang kurang jelas, dan ternyata bahwa dalam menempatkan beberapa pejabat-pejabat yang penting telah ditinggalkan syarat-syarat jiwa patriotisme dan hanya mengutamakan militer technische capaciteit belaka, padahal soal jiwa adalah soal yang primer.
 - b Di dalam menyelenggarakan kebijakan personal dari pimpinan pusat sekarang masih adanya tidak keadilan di dalam perlakuan terhadap pejabat-pejabat yang kurang jujur yang berakhlak rendah.
 - c Dalam penyelenggaraan kebijakan personal dari pimpinan pusat sekarang ternyata kurang efisien mempergunakan tenaga-tenaga pimpinan yang merupakan potensi nasional.
 3. Kebijakan Pendidikan
 - a Di dalam penentuan dasar pendidikan, ialah suatu syarat mutlak di dalam pembangunan tentara, oleh pimpinan pusat sekarang sebagian besar dititik beratkan kepada militer technich, sedangkan pendidikan jiwa kurang diutamakan, begitu pula tidak ditunjukkan kepada pendidikan tugas anggota tentara sebagai ini pelaksanaannya pertahanan rakyat.
 - b Dalam hubungan itu maka pemakaian tenaga *Nederlansche Militaire Missie* adalah tidak sebagaimana mestinya, terbukti dalam penentuan program pendidikan, leerplan, loerstof dan pelaksanaannya.
 4. Kebijakan dalam Tugas Keamanan.
 - a Di dalam menjalankan tugas keamanan oleh pimpinan pusat sekarang kurang diperhatikan usaha-usaha untuk memperkuat tentara di dalam kesadaran ideologi, obyektifiteit dalam pelaksanaan dan pergaulan dengan masyarakat.
 - b Terhadap kepada tindakan keluar pimpinan pusat sekarang kurang memperhatikan usaha-usaha mengadakan anti gerilya dengan menjalankan pertahanan rakyat yang seluas-luasnya, serta kurang mempergunakan aliran-aliran agama yang konstruktief.
 - c Dalam hubungan ini masih perlu merupakan suatu pertanyaan, apakah di dalam *Nederlansche Militaire Missie* tidak ada anasir-anasir yang ada hubungannya dengan kekacauan-kekacauan di dalam negeri.

IV. Demi kepentingan perjuangan kemerdekaan kita yang telah meminta korban teman-teman seperjuangan yang mendahului kita, kami yang masih tertinggal, baik selaku perwira, maupun selaku warga negara, merasa berkewajiban dan merasa berdosa jikalau tidak mengsignaleer kebijakan pemimpinan angkatan perang yang menyimpang dari tujuan perjuangan semula.

V. Dengan adanya pertemuan tersebut di atas telah ternyata adanya perselisihan paham tentang kebijaksanaan pimpinan angkatan perang khususnya angkatan darat, yang akan sangat menjauhkan niat untuk mencapai persatuan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

89

Oleh karena keadaan tersebut di atas adalah tidak sehat dan dapat membahayakan potensi pertahanan negara, lebih-lebih dalam menghadapi kepentingan dunia pada dewasa ini, maka perlu kiranya pemerintah mempercepat penyelesaiannya soal yang kami kemukakan tersebut di atas.

SUMBER: A. H. Nasution. 1983. *Memenuhi Panggilan Tugas (jilid 3: Masa Pancaroba I)*. Jakarta: PT. Gunung Agung.



Lampiran 3

PIAGAM KETENTUAN ANGKATAN DARAT RI (PIAGAM YOGYAKARTA)

Kami para prajurit Angkatan Darat RI yang karena berkah Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan disaksikan oleh:

Presiden/ Pangti, Wakil Presiden, Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, Ketua DPRS, Menhan, para Anggota Pemerintah Pusat, Ketua Seksi Pertahanan DPRS dan para pembesar pemerintah daerah setempat, berkumpul sama bersatu pada 25 Februari 1955 di Yogyakarta, telah berbulat hati menghajatkan daya janji.

1. Angkatan Darat RI adalah sebagian dari persatuan dan kesatuan tenaga, tekad dan tujuan dari bangsa Indonesia yang telah dihimpun di dalam kesatuan yang teratur dan bersenjata untuk membela Nusa dan Bangsa terhadap setiap musuh di dalam maupun di luar tanah air.
2. Jiwa yang bergaya hidup pada Angkatan Darat RI wajiblah dipelihara dan dipupuk sehingga tetap dapat mewujudkan prajurit pelopor pertahanan negara yang berbakti dengan tulus ikhlas.
3. Sifat kesederhanaan dan sifat saling harga-menghargai mewujudkan semangat gotong-royong. Semangat inilah wajib dimiliki setiap prajurit Indonesia.
4. Prajurit Indonesia di dalam pengabdianya adalah secita-cita, seperjuangan dan senasib, sehingga lahirlah sifat setia kawan yang dijunjung tinggi setiap prajurit.
5. Suritauladan wajiblah ditanamkan dalam segala tingkah laku prajurit sebagai anggota Angkatan Darat RI pada khususnya, masyarakat pada umumnya.

Jakarta, 25 Februari 1955
Rapat Para Perwira Angkatan
Darat Republik Indonesia
Ketua,

Jenderal Mayor Bambang Sugeng

SUMBER: A. H. Nasution 1983. *Memenuhi Panggilan Tugas (jilid 3: Masa Pancaroba I)*. Jakarta: Gunung Agung

Lampiran 4

Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/ PANGLIMA TERTINGGI
ANGKATAN PERANG

Dengan ini Menyatakan Dengan Khidmat:

Bahwa Aturan Presiden dan Pemerintah untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang disampaikan kepada segenap rakyat Indonesia dengan amanat Presiden pada tanggal 22 April 1959 tidak memperoleh keputusan dari konstituante sebagai mana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Sementara.

Bahwa berhubung dengan pernyataan sebagian besar anggota-anggota Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar untuk tidak lagi menghindari sidang, konstituante tidak mungkin lagi menyelesaikan tugas yang dipercayai oleh rakyat kepadanya.

Bahwa hal yang demikian menimbulkan keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan Negara, Nusa dan Bangsa, serta merintang pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Bahwa dengan dukungan bagian terbesar rakyat Indonesia dan didorong oleh keyakinan kami sendiri, kami terpaksa menempuh satu-satunya jalan untuk menyelamatkan negara proklamasi.

Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 menilai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.

Maka atas dasar-dasar tersebut di atas,

KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/ PANGLIMA TERTINGGI

ANGKATAN PERANG

Menetapkan pembubaran konstituante,

Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan dekrit ini dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara.

Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, yang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan daerah-daerah dan golongan-golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Juli 1959

Atas Nama Rakyat Indonesia

Presiden Republik Indonesia/ Panglima

Tertinggi Angkatan Perang

SUMBER: Sekretariat Negara Republik Indonesia. 1985. *30 Tahun Indonesia Merdeka*. Jakarta: Lamtoro Gunggung Persada.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

SILABUS DAN PENILAIAN

Nama Sekolah : SMA
Mata Pelajaran : Sejarah
Kelas/ Semester : XII IPS / I

Standar Kompetensi : 1. Menganalisis perjuangan bangsa Indonesia sejak proklamasi hingga lahirnya Orde Baru.

KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR	MATERI PEMBELAJARAN	KEGIATAN PEMBELAJARAN	PENILAIAN	ALOKASI WAKTU	SUMBER BELAJAR/ BAHAN/ ALAT
1.1. Menganalisis perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dari ancaman disintegrasi bangsa terutama dalam bentuk pergolakan dan pemberontakan (antara lain: PKI Madiun 1948, DI/TII, Andi Aziz, RMS, PRRI, Permesta, G30S/PKI)	<ul style="list-style-type: none"> • Mendeskripsiakan lahir dan berkembangnya TNI. • Mendeskripsikan keadaan keamanan awal kemerdekaan • Menjelaskan keadaan politik Indonesia awal kemerdekaan. 	<p>Peranan militer dalam politik Indonesia (1945-1959)</p> <p>1. Latar belakang peranan militer dalam politik Indonesia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lahirnya tentara Indonesia. • Keadaan keamanan awal kemerdekaan. • Keadaan ekonomi awal kemerdekaan. • Keadaan politik awal kemerdekaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Siswa dapat mendeskripsikan latar belakang peranan militer dalam politik Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis tagihan : tugas individu, tugas kelompok, ulangan harian • Bentuk instrumen: laporan tertulis, cek list 	2 jp	<p>SUMBER:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magdalia Alfian, dkk. 2006. <i>Sejarah untuk SMA dan MA kelas XII program IPS</i>. Jakarta: Esis. • A. H. Nasution. 1963. <i>Tentara Nasional Indonesia I</i>. Bandung : Ganaco N. V. • Sudarno, dkk. 1993. <i>Sejarah Pemerintahan Militer dan Peran Pamong praja di Jawa Timur selama Perjuangan Fisik 1945-1950</i>. Jakarta: Balai Pustaka • Moedjanto. G.1988. <i>Indonesia Abad ke-20 jilid 1 (Dari</i>

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	<ul style="list-style-type: none"> • Mendeskripsikan latarbelakang masuknya militer dalam politik masa perang kemerdekaan. • Mendeskripsikan peranan militer dalam politik • Mengidentifikasi peranan militer masa demokrasi liberal. <ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi perkembangan politik setelah militer terlibat di dalamnya. • Mendeskripsikan perkembangan militer setelah terlibat dalam politik. 	<p>2. Peranan militer dalam politik Indonesia (1945-1959)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masa perang kemerdekaan (1945-1950) <ul style="list-style-type: none"> - Masuknya militer dalam politik - Peranan militer dalam politik (1945-1949) • Masa demokrasi liberal (1959-1959) <p>3. Dampak peranan militer bagi pemerintahan Indonesia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagi perkembangan politik. • Bagi perkembangan militer. 	<ul style="list-style-type: none"> • Siswa dapat mengidentifikasi peranan militer dalam politik Indonesia (1945-1959) <ul style="list-style-type: none"> • Siswa dapat menjelaskan berbagai dampak peranan militer bagi pemerintahan Indonesia. 		<p><i>Kebangkitan Nasional sampai Linggarjati</i>. Yogyakarta: Kanisius.</p> <p>Alat/ bahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gambar-gambar tokoh
--	---	---	--	--	--

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	<ul style="list-style-type: none">• Merefleksikan kepemimpinan Sukarno dan Nasution dalam mempertahankan kemerdekaan.	<ul style="list-style-type: none">• Nilai-nilai yang dapat diambil dari perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan.• Nilai-nilai kepemimpinan dari Sukarno dan Nasution	<ul style="list-style-type: none">• Merefleksikan nilai-nilai yang dapat diperoleh dari kepemimpinan Sukarno dan Nasution dalam mempertahankan kemerdekaan			
--	---	--	--	--	--	--

Kepala Sekolah,

(.....)
NIP.

Yogyakarta, 2 Desember 2009

Guru Mata Pelajaran,

Erna Sugiarti
051314018

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran	: Sejarah
Kelas/ Semester	: XII IPS/ I
Materi Pokok	: Peranan militer dalam politik Indonesia (1945-1959).
Metode	: Diskusi
Waktu	: 2 X 45 Menit

1. Standar Kompetensi

Menganalisis perjuangan bangsa Indonesia sejak proklamasi hingga lahirnya Orde Baru.

2. Kompetensi Dasar

Menganalisis perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dari ancaman disintegrasi bangsa terutama dalam bentuk pergolakan dan pemberontakan (antara lain: PKI Madiun 1948, DI/ TII, Andi Aziz, RMS, PRRI, Permesta, G30S/PKI)

3. Indikator

- Mendeskripsiakan lahir dan berkembangnya TNI.
- Mendeskripsikan keadaan keamanan awal kemerdekaan
- Menjelaskan keadaan politik Indonesia awal kemerdekaan.
- Mendeskripsiakan latar belakang masuknya militer dalam politik
- Mendeskripsikan peranan militer dalam poltik perang kemerdekaan
- Mengidentifikasi peranan militer dalam politik masa demokrasi liberal.
- Mengidentifikasi perkembangan politik setelah militer terlibat di dalamnya.
- Mendeskripsikan perkembangan militer setelah terlibat dalam politik.
- Menuliskan kepemimpinan Sukarno dan Nasution dalam mempertahankan kemerdekaan.

4. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi siswa diharapkan mampu :

1. Mendeskripsikan lahir dan berkembangnya TNI.?
2. Menjelaskan keadaan keamanan awal kemerdekaan?
3. Menjelaskan keadaan politik Indonesia awal kemerdekaan
4. Mendeskripsikan latar belakang masuknya militer dalam politik?
5. Mendeskripsikan peranan militer dalam politik perang kemerdekaan?
6. Mendeskripsikan peranan militer dalam politik masa demokrasi liberal?
7. Menjelaskan perkembangan politik dan militer setelah militer terlibat di dalam politik?
8. Nilai-nilai apa yang diperoleh siswa setelah mempelajari peranan militer dalam politik Indonesia (1945-1959).

5. Materi Pembelajaran

1. Latar belakang peranan militer dalam politik Indonesia.
 - Lahirnya tentara Indonesia.
 - Keadaan keamanan awal kemerdekaan.
 - Keadaan ekonomi awal kemerdekaan.
 - Keadaan politik awal kemerdekaan.
2. Peranan militer dalam politik Indonesia
 - Masa perang kemerdekaan (1945-1949)
 - Masuknya militer dalam politik.
 - Bentuk peranan militer dalam politik.
 - Masa demokrasi liberal (1949-1959)
3. Dampak peranan militer bagi pemerintahan Indonesia.
 - Bagi perkembangan politik.
 - Bagi perkembangan militer.

6. Kegiatan Pembelajaran

Pertemuan I

1. Pendahuluan

Motivasi :Siswa dapat menjelaskan perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan.

Prasyarat :Siswa telah memahami perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan.

Apersepsi :Guru memberikan gambaran tentang situasi politik Indonesia awal kemerdekaan.

2. Kegiatan Inti

- Guru membagi siswa dalam 5 kelompok diskusi, setiap kelompok diskusi beranggotakan 7 siswa
- Guru memberikan soal yang akan menjadi bahan diskusi kelompok.

Contoh soal diskusi:

1. Jelaskan latar belakang militer terlibat dalam politik Indonesia awal kemerdekaan, dilihat dari lahirnya Tentara Nasional Indonesia dan keadaan keamanan awal kemerdekaan?
 2. Jelaskan latar belakang militer terlibat dalam politik Indonesia awal kemerdekaan, dilihat dari keadaan ekonomi dan keadaan politik awal kemerdekaan?
 3. Deskripsikan berbagai peranan militer dalam politik Indonesia awal kemerdekaan?
 4. Deskripsikan berbagai peranan militer dalam politik Indonesia masa demokrasi liberal?
 5. Jelaskan berbagai dampak keterlibatan militer dalam politik bagi perkembangan pemerintahan?
- Siswa diminta berdiskusi dengan kelompoknya selama 15 menit.

- Guru meminta salah satu kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya.
- Guru meminta kelompok lain untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada kelompok yang sedang presentasi.
- Guru memberikan penguatan pada jawaban benar yang dikemukakan siswa dan memberikan penjelasan tambahan agar siswa lebih paham.

3. Penutup

- Guru menyimpulkan hasil diskusi.
- Guru meminta siswa berkelompok mengumpulkan hasil diskusi yang telah dikerjakan.
- Guru bersama siswa merefleksikan hasil diskusi untuk menemukan nilai-nilai yang diperoleh setelah mempelajari peranan militer dalam politik Indonesia (1945-1959).
- Tindak lanjut: Siswa ditugaskan untuk membuat karangan minimal 2 halaman dengan tema ” konsep jalan tengah Nasution”.

7. Media Pembelajaran

Buku paket, kartu yang digunakan untuk membagi siswa dalam kelompok diskusi, foto, *white board*.

8. Penilaian

1. Penilaian Produk

Jenis tagihan: Tes.

Contoh tes:

1. Deskripsikan lahir dan berkembangnya TNI.?
2. Jelaskan keadaan keamanan awal kemerdekaan?
3. Jelaskan keadaan politik Indonesia awal kemerdekaan
4. Deskripsikan latar belakang masuknya militer dalam politik?
5. Deskripsikan peranan militer dalam politik perang kemerdekaan?
6. Deskripsikan peranan militer dalam politik masa demokrasi liberal?

7. Jelaskan perkembangan politik dan militer setelah militer terlibat di dalam politik?
8. Nilai-nilai apa yang diperoleh siswa setelah mempelajari peranan militer dalam politik Indonesia (1945-1959)?

2. Penilaian Proses

- Jenis tagihan: laporan tertulis

Contoh:

Buatlah karangan minimal 2 halaman dengan tema ” konsep jalan tengah Nasution”

- Lembar penilaian Afektif

Nama Siswa	Menghargai teman	Mengambil giliran	Mengajukan pertanyaan	Mempresentasikan	Menjawab pertanyaan	Jumlah

Keterangan:

Skor 1 : pasif, tidak kooperatif dan tidak menghargai teman

Skor 2 : pasif, tidak kooperatif tetapi dapat menghargai teman

Skor 3 : pasif, kooperatif dan dapat menghargai teman

Skor 4 : aktif, kooperatif dan dapat menghargai teman

Skor 5 : sangat aktif, sangat kooperatif, dan tidak menghargai teman.

$$N = \frac{\text{Jumlah Skor}}{25} \times 100 \%$$

$$NA = \frac{\text{Nilai Proses} + \text{Nilai Hasil}}{2}$$

Keterangan :

N = Nilai

NA = Nilai Akhir.

9. Tindak Lanjut

- Siswa dinyatakan berhasil apabila memenuhi Standard Kelulusan Minimal sebesar 65%
- Memberikan program remidi untuk siswa yang tingkat pencapaiannya kurang dari 65%
- Memberikan program pengayaan untuk siswa yang tingkat pencapaiannya lebih dari 65%

10. Sumber bacaan

- Magdalia Alfian, dkk. 2006. *Sejarah untuk SMA dan MA kelas XII program IPS*. Jakarta: Esis.
- A. H. Nasution. 1963. *Tentara Nasional Indonesia I*. Bandung : Ganaco N. V.
- Sudarno,dkk. 1993. *Sejarah Pemerintahan Militer dan Peran Pamong praja di Jawa Timur selama Perjuangan Fisik 1945-1950*. Jakarta: Balai Pustaka
- Moedjanto. G.1988. *Indonesia Abad ke-20 jilid 1 (Dari Kebangkitan Nasional sampai Linggarjati)*. Yogyakarta: Kanisius.

Yogyakarta, 2 Desember 2009

Kepala Sekolah,

Guru Mata Pelajaran,

(.....)

NIP.

Erna Sugiarti

051314018.